

**PERSEPSI PEMILIH PEMULA TERHADAP CALEG POHON PADA
PEMILU 2019 (STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AFDHAL

NIM. 160801036

**Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
TAHUN 2021 / 1442**

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Afdhal

NIM : 160801036

Program Studi : Ilmu Politik

Universitas : Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Banda Aceh, 23 Desember 2021



Menyatakan

Muhammad Afdhal

NIM. 160801036

**“ PERSEPSI PEMILIH PEMULA TERHADAP CALEG POHON
TAHUN 2019
(STUDI KASUS BANDA ACEH) ”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

MUHAMMAD AFDHAL

NIM.160801036

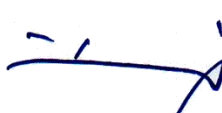
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Politik

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Muhammad Thalal, Lc., M.Si, M.Ed
NIP. 197810162008011011


Melly Masni, M.IR
NIP.199305242020122016

SKRIPSI

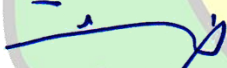
**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Politik**

**Diajukan Oleh :
MUHAMMAD AFDHAL
NIM.160801036**

Pada Hari/Tanggal
Rabu: 29 Desember 2022
25 Jumadil Awal 1443

Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua


Muhammad Thalal, Lc., M.Si, M.Ed
NIP. 197810162008011011

Sekretaris


Melly Masni, M.IR
NIP.199305242020122016

Penguji 1


Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 196610231994021001

Penguji 2


Rizkika Ehen Darwin, MA
NIP.198812072018032001

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh**




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M. Hum
NIP. 197307232000032002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. Shalawat teiring salam marilah sama-sama kita hantarkan buat baginda kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat beliau serta orang-orang mukmin yang tetap istiqomah di jalan-Nya. Proposal skripsi yang dapat diselesaikan peneliti yaitu berjudul “Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Caleg Pohon Di Banda Aceh”.

Proposal skripsi ini dapat tersusun berkat bimbingan dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan proposal ini. Penulis tidak akan melupakan jasa baik semuanya, dan semoga Allah SWT membalas amal dan budi baik kalian semua. Mudah-mudahan apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat menambahkan informasi dan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayah dan Ibunda tercinta serta keluarga yang tanpa henti mendukung dan memberikan doa kepada anaknya , sehingga skripsi ini dapat kami selesaikan dengan baik.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Abdullah Sani, Lc, M.A.selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik.

4. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik.
5. Bapak Thalal, Lc, M.Si.,M.Ed. Sebagai pembimbing pertama saya dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Melly Masni, M.IR. Sebagai pembimbing kedua saya dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Eka Januar, M.Soc.Sc. Selaku dosen wali saya diprogram Studi Ilmu Politik.
8. Ibu Aklima, S.Fil.I., MA. Selaku dosen pembimbing saya dalam menyelesaikan seminar proposal skripsi .
9. Seluruh Dosen yang berada di ruang lingkup Prodi Ilmu Politik , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan menambah wawasan bagi penulis, serta staff administrasi yang berada di ruang lingkup prodi Ilmu Politik yang banyak membantu kelancaran dalam proses penyusunan proposal ini.
10. Teman-teman angkatan 2016 Prodi Ilmu Politik yang telah mendukung dan memberi dorongan serta memberikan masukan/kritikan kepada penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa di dalam penulis membuat skripsi ini tentunya masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna meningkatkan kemampuan penulis di waktu akan datang. Akhir kata kepada Allah SWT kita mohon petunjuk

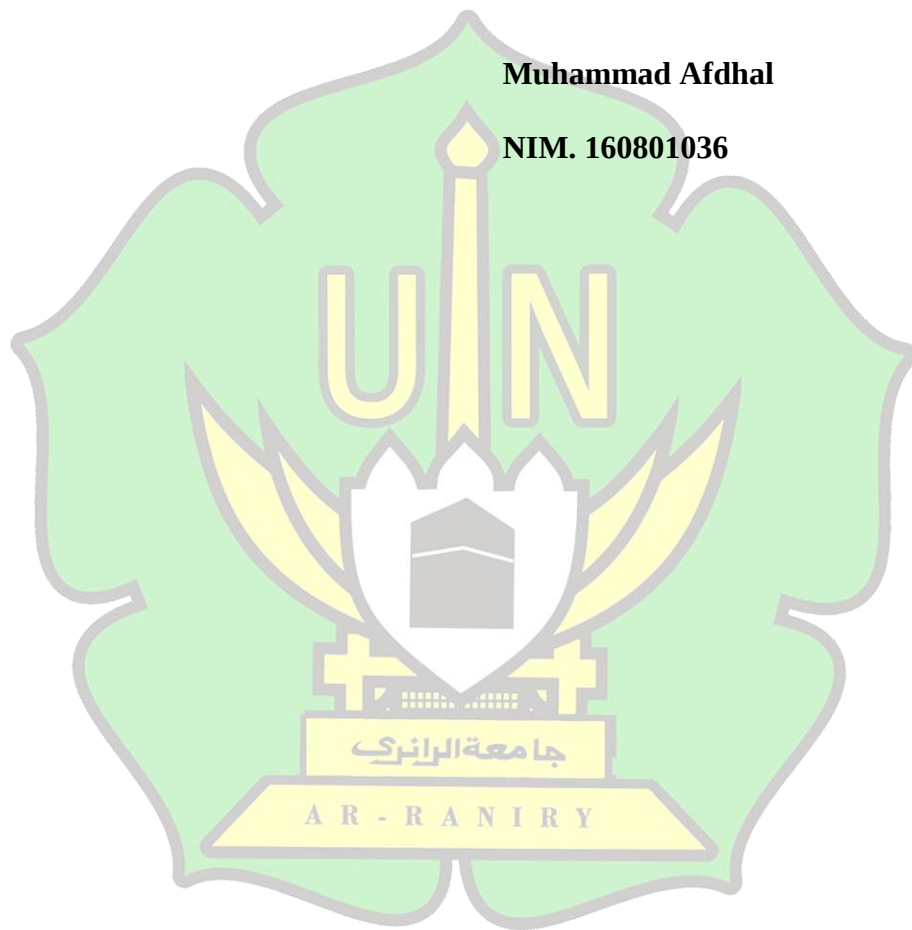
dan semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal
A'lamin.

Banda Aceh, 29 Desember 2021

Penulis,

Muhammad Afdhal

NIM. 160801036



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR DIAGRAM	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Teori.....	19
2.2.1. Green Political Theory	19
2.2.2. Political Behavior	20
2.2.3. Teori Persepsi	25
2.2.4. Pemilih Pemula.....	26

2.2.5. Caleg Pohon.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Metode Penelitian.....	33
3.2. Populasi dan Sampel	35
3.3. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	38
3.4. Tehnik Pengumpulan Data.....	38
3.5. Fokus Penelitian	39
3.6. Lokasi Penelitian.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
4.1. Letak Geografis Kota Banda Aceh.....	41
4.2. Panwaslih Kota Banda Aceh	42
4.2.1. Tugas panwaslih.....	43
4.3. Pemilih Pemula Dapil 3 Kota Banda Aceh	45
4.4. Persepsi Pemilih Pemula Mengenai Caleg Pohon.....	46
4.5. Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilu 2019	49
4.5.1. Pendekatan Sosiologis.....	54
4.5.2. Pendekatan Psikologis.....	55
4.5.3. Pendekatan Pilihan Rasional	57
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Rekap Pemilih Pemula Kec Syiah Kuala Tahun 2019	37
Tabel 2 : Rekap Pemilih Pemula Kec Ulee Kareng Tahun 2019.....	38
Tabel 3 : Rekap Total Data Pemilih Pemula Dapil 3	38
Tabel 4 : Hasil Karateristik Responden Berdasarkan Alamat Daerah	47
Tabel 5 : Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
Tabel 6 : Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	49
Tabel 7 : Hasil karakteristik Responden Berdasarkan Intansi	50

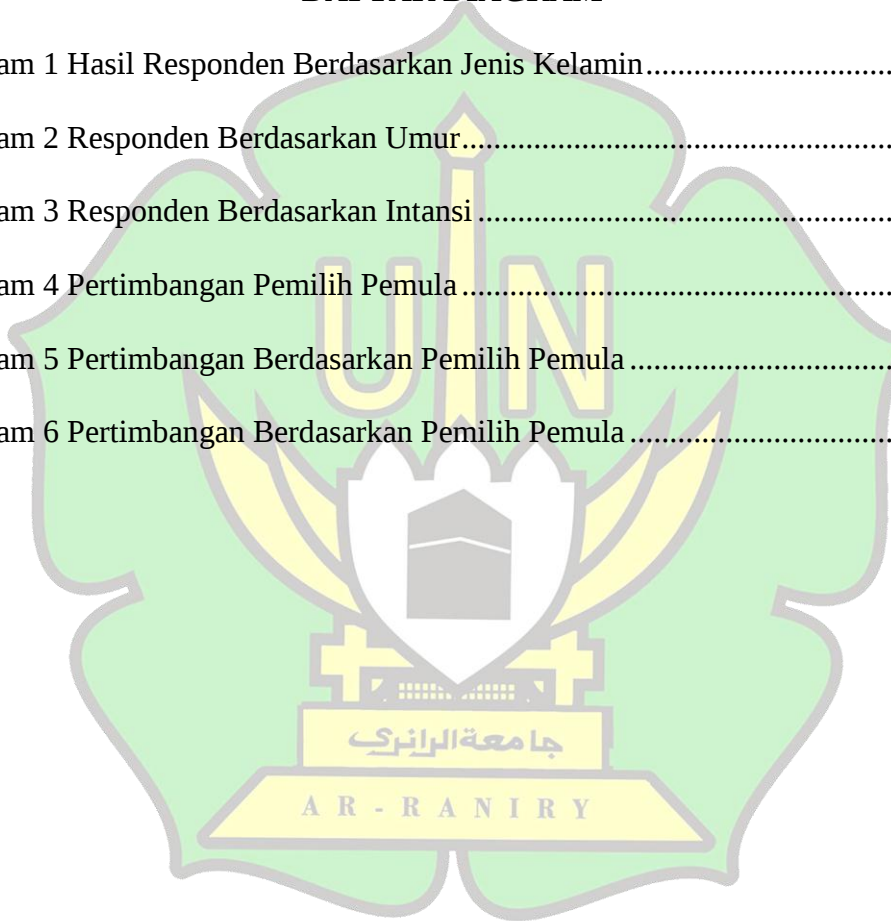


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Kota Banda Aceh	41
---------------------------------------	----

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Hasil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
Diagram 2 Responden Berdasarkan Umur.....	50
Diagram 3 Responden Berdasarkan Intansi	51
Diagram 4 Pertimbangan Pemilih Pemula	52
Diagram 5 Pertimbangan Berdasarkan Pemilih Pemula	54
Diagram 6 Pertimbangan Berdasarkan Pemilih Pemula	56



ABSTRAK

Pemilu merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Caleg pohon dapat dipahami sebagai segala bentuk aktivitas yang berupa komunikasi untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, dan jasa. Sementara itu komunikasi merupakan cara atau proses interaksi antara sesama manusia yang diharapkan dapat diterima dan dimengerti oleh sesama. Pemilih pemula adalah Orang yang baru pertama kali terdaftar untuk memenuhi syarat sebagai pemilih pemula yaitu memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Hasil penelitian ini berupaya untuk membantu pemilih pemula dan kandidat caleg, untuk mengurangi dampak kerugian dalam lingkungan kegiatan pemilu.

Kata kunci : Pemilu, Pemilih pemula, Caleg pohon.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menandai masa kampanye Pemilu 2019, setiap sudut kota di Indonesia diwarnai dengan tempelan-tempelan dari para caleg. Dalam menyambut pesta demokrasi yang diadakan setiap 5 tahun sekali tersebut, para calon legislatif gencar memasang stiker, baliho, dan spanduk yang merupakan bagian dari upaya mengiklankan atau memperkenalkan diri ke masyarakat luas. Oleh karena itu, biasanya mereka menempelkan atribut-atribut kampanye tersebut bertebaran di sepanjang jalan raya.

Iklan sendiri dapat dipahami sebagai segala bentuk aktivitas yang berupa komunikasi untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, dan jasa. Menurut Indra J. Piliang dalam Setiyono.¹ iklan-iklan tersebut belum mendidik rakyat. Ini terlihat dari beberapa hal. Pertama, banyak substansi iklan yang tidak logis sehingga mengesankan ekstasi politik dan demokrasi semata.² Usaha yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dalam iklan politik dapat mendidik rakyat yaitu menjadi contoh terhadap masyarakat yang juga menempelkan iklan poster di sepanjang jalan agar lebih efektif dan efisien serta tidak melakukan tempelan sembarangan dan juga tidak memaku pohon, karena hal tersebut justru dapat merusak lingkungan.

¹ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 364

² Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 364

Hal ini sesuai dengan berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan, yaitu bagaimana spanduk dan poster-poster caleg bertebaran di sekitar jalan yang ditempelkan di sembarang tempat. Padahal iklan politik seharusnya jangan sampai berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Hal ini juga salah satu fenomena yang penulis jumpai di Kota Banda Aceh tatkala Pemilu 2019 menjelang. Seolah hal tersebut menjadi pemandangan yang lumrah setiap pesta demokrasi dimulai. Padahal iklan yang ditempelkan di sembarang tempat seperti di pohon-pohon berpotensi merusak lingkungan. Begitu pula yang ditempelkan di tikungan jalan raya yang dikhawatirkan dapat mengalihkan perhatian pengguna jalan sehingga dapat mengurangi fokus hingga menyebabkan kecelakaan.

Iklan caleg seperti baliho, spanduk, dan poster-poster yang melanggar ketertiban lalu lintas dan ditempelkan di pohon-pohon sering pula disebut dengan sebutan *caleg pohon*. Caleg pohon merupakan salah satu media yang cukup sering digunakan oleh aktor-aktor politik terutama untuk mempromosikan dirinya. Cara ini dianggap sebagai salah satu sarana yang efektif bagi partai politik dan calon legislatif untuk dapat memperkenalkan dirinya ke publik dengan mudah. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membuat masyarakat lebih familiar dan mengenal sosok yang ditampilkan pada iklan tersebut. Harapannya, semakin mereka dikenal oleh masyarakat, pada akhirnya masyarakat akan bersedia memberikan suaranya untuk para caleg tersebut.

Tentu saja hal ini tidak menjadi problematika jika atribut-atribut tersebut ditempelkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun kenyatannya,

sering kali atribut-atribut ini menyebabkan berbagai masalah karena pemasangannya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan pemasangan yang benar pada akhirnya menyebabkan terganggunya lalu lintas di jalan raya serta membahayakan jiwa masyarakat. Spanduk atau baliho yang ditempelkan di persimpangan, misalnya, berpeluang mengganggu fokus dan mengalihkan pandangan masyarakat yang sedang berkendara yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas di area tersebut.

Pada kenyataannya, pemandangan seperti disebut di atas dapat dengan mudah ditemukan di Kota Banda Aceh, sebagaimana diberitakan oleh detiknews pada 1 Maret 2019 dengan judul berita “*Ribuan Spanduk Caleg di Banda Aceh Dibongkar dari Fasilitas Publik*.³” Pembongkaran ini dilakukan karena begitu banyak caleg yang melanggar aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan memasangnya pada tempat-tempat yang terlarang. Pembongkaran yang dilakukan oleh Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih/Bawaslu Aceh) pun terpaksa dilakukan. Tidak hanya itu, penyitaan spanduk selama 18 hari pun turut dilakukan.

Reklame politik sebenarnya merupakan salah satu proses dari rangkaian pemilihan umum untuk mengkampanyekan diri menggunakan atribut kampanye berupa iklan media di ruang publik. Iklan adalah elemen dari komunikasi yang berbaur komunikasi (*Communication mix*) yang berfungsi untuk menciptakan promosi yang efektif dan efisien. Tahapan komunikasi meliputi periklanan

³ <https://news.detik.com/berita/d-4449707/ribuan-spanduk-caleg-di-banda-aceh-dibongkar-dari-fasilitas-publik>

(*advertising*), promosi penjualan (*sales promotion*), penjualan pribadi (*personal selling*), hubungan masyarakat (*public relation*), dan penjualan langsung (*direct selling*). Selain itu, iklan merupakan media promosi yang berguna untuk menumbuhkan kesadaran sebuah produk atau layanan (*awareness*), membangkitkan keinginan untuk memiliki atau memperoleh produk (*interest*), dan mempertahankan loyalitas pelanggan (*loyalty*).⁴

Ketika masa kampanye berlangsung, di berbagai sudut jalan di Kota Banda Aceh tampak terpampang berbagai poster kampanye meliputi baliho, spanduk dan berbagai APK caleg lainnya. Pembongkaran-pembongkaran pun kerap dilakukan oleh petugas Panitia Pengawasan Pemilihan yang bekerjasama dengan Satpol PP karena ditemukannya pelanggaran-pelanggaran dalam pemasangan atribut kampanye. Tim ini melakukan pembersihan di sepanjang area jalan di kawasan Pemkot Banda Aceh yang sebenarnya merupakan zona bebas atribut politik.

Fenomena caleg pohon di tahun 2019 mendapatkan perhatian publik serta respon yang beragam dari masyarakat. Berbagai instrumen warna-warni caleg pohon telah merubah warna Kota Banda Aceh. Suasana yang kerap terjadi menjelang pemilihan umum ini pun menuai kritik dari banyak kalangan aktivis dan civitas akademik yang menganggap perlunya upaya untuk bersama-sama memperbaiki ruang publik yang semestinya tertata dengan rapi dan bersih. Salah satu akademisi yang mengkritisi terkait caleg yang melanggar APK yaitu Yusuf Al Qardhawi, dosen UIN Ar-Raniry yang juga merupakan ketua Panwaslih di

⁴ Kennedy, John E dan Soemanagara, R Dermawan, *Marketing Communication* ,(Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2006) hal.6

Banda Aceh tahun 2019. Menurutnya, caleg yang melanggar APK akan dijerat hukum dan denda sesuai dengan butir UU No 23 tahun 2003.

Keberadaan spanduk-spanduk Caleg tersebut dinilai banyak melanggar aturan, karena dipasang di tempat-tempat terlarang. Selain melanggar aturan, juga tidak ramah lingkungan karena ditempelkan di pepohonan. Komisioner Panwaslih Kota Banda Aceh, Yusuf Alqardawi, juga menegaskan bahwa pihaknya mengamankan rata-rata 200 APK per hari. Paling banyak di jalan protokol atau di jalan dua jalur. Penertiban ini dilakukan secara terus menerus dalam setiap minggu agar kota bisa tertata dengan rapi. Akibatnya, sekitar tiga ribuan APK telah diamankan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh selama periode Januari-Februari 2019. APK itu ditertibkan karena melanggar unsur etika dan estetika kota, keindahan, kebersihan dan keamanan, serta karena dipasang di tempat dilarang.

Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) atas rekomendasi Panwaslih Kota Banda Aceh yang difokuskan di jalan-jalan protokol, pohon dan tiang listrik. Menurutnya, atribut APK berupa baliho tidak boleh melebihi ukuran 4 x 7 meter, spanduk 1,5 x 7 meter dan umbul-umbul 5 x 7 meter. Jika yang dipasang di bawah ukuran tersebut dan di lokasi yang telah direkomendasikan, maka petugas tidak akan menertibkannya. Sebelum APK yang melanggar ditertibkan, Panwaslih terlebih dahulu memberikan peringatan terhadap pemilik APK. Jika peringatan tersebut tidak dipatuhi, pihaknya langsung mengamatkannya.

Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh, Afrida, pada diskusi publik Pemilu Ramah Lingkungan, pada 11 Februari 2019 lalu menyatakan bahwa upaya penertiban tersebut bukan baru pertama kali dilakukan. Pihaknya sudah berulang kali melaksanakan penertiban APK sejak Desember 2017. Namun walaupun penertiban terus dilakukan, akan tetapi masih banyak juga caleg-caleg pohon yang bermunculan. Menurut Afrida, yang menjadi permasalahan pengawasan di masa tahapan kampanye yakni penempatan APK caleg di lokasi yang terlarang. Mulai dari tahun 2018, ada sekitar 700-an APK yang dibersihkan. Kemudian, pada 2019 pelanggaran APK dalam kurun waktu Januari-Februari 2019 saja sudah mencapai ribuan.

Menurut Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur, dari sisi ekologis, memasang spanduk, baliho, dan poster dengan menggunakan paku di pohon sama dengan mengganggu tanaman tersebut, karena menyisakan besi berkarat pada pohon. Tentu saja ini mengganggu pertumbuhan tanaman. Ia menyarankan agar pemilih di Aceh dapat mengawasi perilaku Caleg saat berkampanye. “Jika pohon saja tidak sanggup mereka jaga, mana mungkin Caleg terpilih mampu menjaga Aceh yang begitu lengkap dengan masalah sosial, lingkungan, dan HAM,” ujar Muhammad Nur. Menurutnya lagi, perilaku kecil dari seorang caleg, dapat mencerminkan kepribadiannya untuk dapat mengabdikan pada warga dan bangsa yang besar ini.

Pemasangan APK harusnya tidak melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1096/ PL.01-5Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang petunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam Pemilu Tahun 2019. Di dalam aturan tersebut

salah satunya mengatur larangan pemasangan APK pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, Marini menyarankan kepada pemilih di Aceh dapat membantu Panwaslih melakukan pengawasan bersama terkait pelanggaran yang terjadi selama tahapan kampanye. Selain itu, pemilih diharapkan lebih cerdas dalam memilihnya, jangan sampai memilih caleg yang melanggar karena itu akan mempengaruhi kemajuan bangsa ini.⁵ Hal ini sangat disayangkan karena meskipun caleg pohon berfungsi sebagai sebuah proses marketing politik yang cukup berperan dalam sosialisasi politik, namun penting pula untuk memperkirakan kemaslahatannya bagi kepentingan umum serta menjaga agar fasilitas umum tidak terganggu diakibatkan penggunaan instrumen politik tersebut.

Dalam perkembangannya, caleg pohon yang melanggar aturan pemasangan APK kian bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Afrida selaku Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh menyatakan bahwa “Penertiban sudah dilaksanakan sejak akhir 2017, kemudian di tahun 2018 ada sekitar 700-an APK yang dibersihkan. Sementara di 2019, Menurut Afrida, sejak 28 Januari lalu hingga saat ini sudah 10 kali penertiban, dalam diskusi Pemilu Ramah Lingkungan, Senin (11/2/2019). Afrida mengaku kewalahan saat melihat fenomena APK caleg yang bertaburan di beberapa titik kota Banda Aceh. Pasalnya, setelah alat-alat peraga itu dibersihkan, keesokan hariannya kembali

⁵ Kumparan News, 12 Februari 2019, *WALHI Aceh: Jangan Pilih Caleg yang Merusak Pohon*

terpasang. Anehnya lagi, ketika petugas panwas membersihkan umbul-umbul milik caleg A, keesokan harinya terpasang milik caleg partai lain.

Pesta pemilu yang diwarnai dengan berbagai atribut kampanye seperti baliho, poster, dan spanduk ini pun menjadi ramai diperbincangkan, baik itu di ruang publik maupun di media-media. Hal ini dikarenakan pemasangannya yang begitu masif bahkan bukan hanya di sepanjang jalan saja, akan tetapi meliputi tempat-tempat umum lainnya seperti jembatan, rumah ibadah, bahkan dinding perumahan pun ikut menjadi sasarannya. Hal ini ikut menjadi salah satu bukti betapa gencarnya upaya-upaya yang dilakukan caleg dan tim suksesnya dalam mengincar kursi legislatif.

Hal tersebut memberikan gambaran bagaimana caleg pohon telah digunakan oleh aktor-aktor yang menjadi calon legislatif dalam pemilu 2019 sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan diri ke hadapan publik. Sebuah pertarungan tokoh-tokoh yang berasal dari partai nasional maupun partai lokal yang sama-sama berkeinginan menduduki kursi DPRK. Beberapa merupakan pemain baru yang popularitasnya masih relatif sangat rendah sehingga berbagai usaha kampanye termasuk caleg pohon pun harus gencar dilakukan demi menarik minat public terhadapnya.

Hal tersebut pulalah yang mendorong berbagai bentuk kampanye dilakukan para caleg DPRK di Banda Aceh dengan memanfaatkan APK seperti baliho, poster dan spanduk yang dipajang di fasilitas-fasilitas publik. Hampir di setiap sudut jalan Banda Aceh dipenuhi dengan berbagai atribut caleg dari berbagai

macam partai, mulai dari partai PAN, Demokrat, PDIP, Golkar, PPP, Hanura, PKS, hingga PA, PNA, PDA dan juga partai-partai lainnya.

Sosialisasi caleg pohon sangat fenomenal saat pesta demokrasi 2019 berlangsung. Wajah Kota Banda Aceh seolah-olah berubah menjadi kota yang baru karena dipenuhi dengan warna-warni partai politik yang sebelumnya tidak ada. Kota Banda Aceh sendiri terbagi ke dalam 5 dapil diantaranya, dapil 1 Kecamatan Baiturrahman-Lueng Bata, dapil 2 Kecamatan Kuta Alam, dapil 3 Kecamatan Syiah Kuala-Ule Kareng, dapil 4 Kecamatan Jaya Baru-Banda Raya, dan dapil 5 Kecamatan Meuraxa-Kutaraja.

Dari pengamatan penulis, mayoritas caleg DPRK Banda Aceh yang terpilih dalam pemilihan legislatif 2019 di dapil 3 merupakan wajah-wajah baru seperti Irwansyah, Amd (Gerindra), Amri,SHI (Golkar), Tuanku Muhammad, Spd.M.Ag.(PKS). APK seperti baliho, poster dan spanduk adalah hal yang paling mudah dilakukan caleg dalam melakukan kampanyenya. Strategi ini dilakukan agar tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu meningkat dan tertarik untuk memilih calon-calon kandidat tersebut. Oleh karenanya, tidak heran jika kita menjumpai poster caleg yang bertebaran di Area Jalan Banda Aceh khususnya di dapil 3 Kecamatan Syiah Kuala-Ule Kareng. Selain itu, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dan Yayasan Indonesia CeraH pada tahun 2021, sensitifitas generasi muda terhadap isu lingkungan dan krisis iklim, menempati urutan kedua setelah isu korupsi.⁶ Hal inilah yang menjadi landasan awal sehingga peneliti tertarik untuk mendalami apakah isu lingkungan,

⁶ <https://www.greeners.co/berita/survei-52-persen-generasi-muda-peka-isu-lingkungan-dan-krisis-iklim/>

dalam hal ini caleg pohon, turut mempengaruhi perilaku pemilih pemula di dapil 3 dalam menentukan pilihan politiknya ketika berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 2019 yang lalu, dan bagaimana persepsi pemilih pemula dalam memandang instrumen politik yang menggunakan caleg pohon untuk menarik minat pemilih.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian berjudul “Persepsi Pemilih Pemula terhadap Caleg Pohon Di Banda Aceh pada Pemilu 2019,” maka rumusan masalah yang penulis ajukan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana persepsi pemilih pemula Dapil 3 kota Banda Aceh terhadap caleg pohon?
2. Bagaimana dampak persepsi terhadap caleg pohon pada pilihan politik pemilih pemula pada Dapil 3 Kota Banda Aceh?

1.3.Tujuan Penelitian

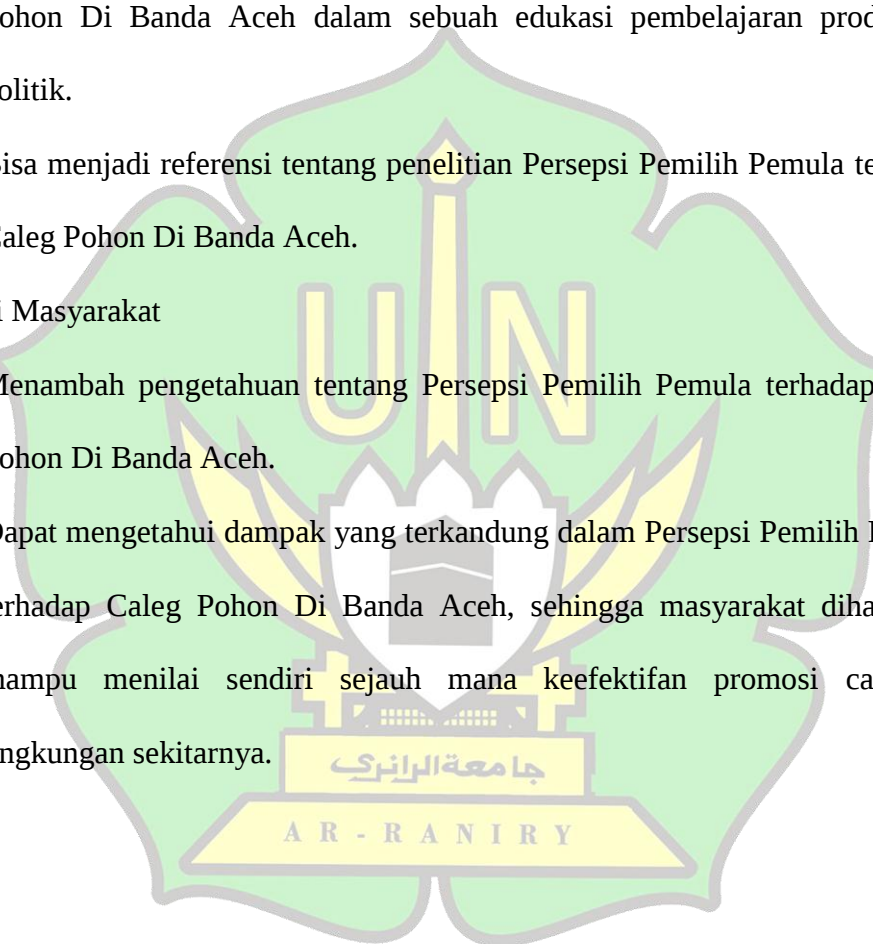
Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan agar mendapatkan keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang :

1. Persepsi pemilih pemula kota Banda Aceh terhadap caleg pohon.
2. Dampak persepsi terhadap caleg pohon pada pilihan politik para pemilih pemula di kota Banda Aceh.

1.4 . Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian Persepsi Pemilih Pemula terhadap Caleg Pohon Di Banda Aceh yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Civitas Akademika
 - a. Bisa mengkaji lebih dalam tentang Persepsi Pemilih Pemula terhadap Caleg Pohon Di Banda Aceh dalam sebuah edukasi pembelajaran prodi ilmu politik.
 - b. Bisa menjadi referensi tentang penelitian Persepsi Pemilih Pemula terhadap Caleg Pohon Di Banda Aceh.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Menambah pengetahuan tentang Persepsi Pemilih Pemula terhadap Caleg Pohon Di Banda Aceh.
 - b. Dapat mengetahui dampak yang terkandung dalam Persepsi Pemilih Pemula terhadap Caleg Pohon Di Banda Aceh, sehingga masyarakat diharapkan mampu menilai sendiri sejauh mana keefektifan promosi caleg di lingkungan sekitarnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini ada beberapa kutipan referensi terdahulu yang menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian penulis. Penelitian yang terkait dengan tema yang penulis ajukan, sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh para penulis dan peneliti terdahulu. Oleh karena itu, bagian ini akan didedikasikan untuk mendiskusikan berbagai penelitian terdahulu yang terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh Deborah Lynn Guber dengan judul “*Voting Preferences and the Environment in the American Electorate* (Preferensi Pemungutan Suara dan Lingkungan di Elektorat Amerika)”. Penelitian ini menggunakan data *National Election Study* (NES) 1996 untuk menguji dampak kepedulian lingkungan terhadap sikap terhadap partai politik Amerika dan kandidatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sementara isu lingkungan merupakan kekuatan dari partai Demokrat, isu tersebut jarang membentuk preferensi suara individu karena tiga alasan: (1) arti-penting isu yang rendah; (2) perbedaan kecil yang dirasakan antara kandidat tentang masalah kebijakan lingkungan dan (3) kecenderungan kepedulian lingkungan untuk memotong perpecahan tradisional, termasuk identifikasi partisan.⁷ Meskipun bukti dari konsensus lingkungan tumbuh di Amerika Serikat, mahasiswa politik elektoral

⁷ Deborah Lynn Guber, 2001. *Jurnal Masyarakat dan Sumber Daya Alam*, 14:455–469, Hak Cipta Taylor & Francis, Hal 455

telah lama mempertanyakan signifikansi politik lingkungan dengan mencatat hampir tidak adanya isu-isu lingkungan dari kampanye politik nasional.⁸

Meskipun isu lingkungan telah dipertahankan sebagai isu penting oleh beberapa orang, terutama dalam pemilihan negara bagian dan lokal, keengganan pemilih Amerika untuk memberikan suara untuk kandidat di tingkat nasional berdasarkan catatan atau posisi lingkungan mereka tampak jelas.⁹ Dalam memastikan bahwa isu lingkungan jarang membentuk preferensi suara individu, data sensus tetap berharga dalam membantu mengidentifikasi alasannya.

Dalam menulis tentang dampak isu lingkungan dalam kampanye presiden, Shabe-Coff menyimpulkan catatan lingkungan yang lemah sejauh ini masih belum dipertimbangkan.¹⁰ Walaupun lingkungan memiliki dampak yang sangat kecil pada politik elektoral di tingkat nasional dan orang sangat peduli tentang lingkungan, mereka belum mempertimbangkan setidaknya memilih kandidat sebagian besar karena catatan lingkungan.¹¹ Isu lingkungan memberikan contoh utama bagaimana lingkungan memiliki dampak yang sangat kecil pada politik elektoral, khususnya di tingkat nasional.

Kesimpulan penelitiannya adalah bahwa isu lingkungan tidak menjadi pertimbangan yang menentukan preferensi pemilih. Walaupun isu lingkungan adalah faktor yang paling penting dalam kehidupan manusia, akan tetapi hal-hal seperti ini luput dari pandangan dan perhatian dari pemilih.

⁸ ibid Hal 455

⁹ Ibid, Hal 455

¹⁰ Shabe-Coff (1992, 73-74)

¹¹ Ibid , Hal 456

Adapun penelitian terdahulu lainnya yaitu yang dilakukan oleh Indra Nugraha, dengan judul penelitian “Bagaimana Isu Lingkungan dalam Pemilu 2019? Begini Hasil Riset CSIS”. Kesimpulan penelitiannya adalah: 1) Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pekan lalu, menyebutkan, dalam visi misi partai politik sangat minim menyebutkan soal lingkungan. Sementara dalam visi misi capres, isu lingkungan sudah disebutkan. 2) Dalam menentukan pilihan, masyarakat cenderung tak jadikan isu lingkungan hidup sebagai alasan memilih partai politik maupun pasangan capres-cawapres. 3) CSIS, mempelajari persepsi masyarakat terhadap isu-isu sosial dan ekonomi dan lingkungan di level nasional. Melalui survei ini, mereka mempelajari korelasi antara pentingnya isu-isu lingkungan dan preferensi politik masyarakat pada pemilu 2019. 4) Penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam program pelestarian alam dan lingkungan hidup, responden menyatakan berhasil 57,19%, kurang berhasil 33,98%, tak berhasil sama sekali 4,03%, tidak tahu 4,80%. Dari angka itu, 71,06% menyatakan akan memilih presiden petahana, 23,73% pilih capres oposisi. Sisanya, tak tahu atau belum menentukan pilihan.

CSIS, katanya, juga mempelajari persepsi masyarakat terhadap isu-isu sosial dan ekonomi serta lingkungan di level nasional. Melalui survei ini, mereka mempelajari korelasi antara pentingnya isu-isu lingkungan dan preferensi politik masyarakat pada pemilu 2019. Di samping itu, mereka juga mempelajari bagaimana pelaku politik di Indonesia melakukan *framing* terhadap masalah lingkungan, sebagaimana tercermin dalam visi-misi dan wawancara dengan pelaku parpol. Hal ini dilakukan dengan survei pada 34 propinsi menggunakan

kuesioner terstruktur dengan 1.960 orang responden yang terdiri dari Jakarta (80), Jawa Barat-Banten (420), Jawa Tengah-Yogyakarta (310), Jawa Timur (320), Sumatera (389), Kalimantan (130), Sulawesi (140), NTB-NTT-Bali (101), dan Maluku-Papua (70).

Selain itu, CSIS juga, menganalisa dokumen visi-misi parpol dan capres-cawapres. Guna mempertajam survei, mereka juga melakukan wawancara mendalam dengan pengurus beberapa partai politik, menanyakan bagaimana pelaku politik menentukan isu-isu yang akan diangkat dalam kampanye politik. Berdasarkan *desk studies* dan *in-depth interview* dengan beberapa pengurus partai politik, hanya satu partai yang secara spesifik menyebutkan, kata ‘lingkungan’ dalam dokumen visi dan misi, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Pada hampir semua partai yang ikut dalam kontestasi 2019, visi dan misi partai memiliki titik berat pada ekonomi, sejahtera dan adil, stabilitas politik dan demokrasi, serta pendidikan dan kesehatan.

Puspa, dari CSIS mengatakan, sedikit sekali partai yang spesifik menyebut lingkungan hidup sebagai satu isu utuh. Isu lingkungan dalam visi misi partai politik cenderung menempel pada isu ekonomi. Dalam dokumen visi misi kedua paslon capres-cawapres, paslon 01 menuliskan visi untuk mencapai lingkungan hidup berkelanjutan. Dengan misi yang disertakan antara lain, mengenai pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi, mitigasi perubahan iklim, serta penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup.

Untuk paslon 02, dalam visi menyebut kalimat “membangun perekonomian nasional adil, makmur, berwawasan lingkungan melalui jalan politik-ekonomi sesuai amanat konstitusi”. Untuk misi, dituliskan

“akan berperan aktif mengatasi perubahan iklim global sesuai kondisi Indonesia. Memberikan hukuman seberat-seberatnya bagi pemilik perusahaan yang terlibat pembalakan liar, kebakaran hutan dan pembunuhan hewan langka dilindungi”.

Bagaimana persepsi masyarakat melihat dokumen visi misi parpol dan kedua paslon? Hasil survei CSIS menunjukkan, 41.02% responden menyatakan pernah mendengar visi-misi capres-cawapres dalam bidang pelestarian dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Dari persentase itu, 76.37% mengatakan paham tentang visi-misi itu.

Untuk visi misi parpol, 22.86% menyatakan pernah mendengar visi misi bidang lingkungan. Dari persentase itu, 79.69% mengatakan paham tentang visi-misi di bidang itu. “Saat kami menanyakan kepada pengurus parpol mengapa isu lingkungan tak menarik dalam kampanye, kata mereka, isu lingkungan bukan diminati para pemilih. Isu ini juga dianggap sulit dikapitalisasi.”

Secara strategis, katanya, kandidat politik sulit mengangkat isu lingkungan karena mendapatkan kontribusi dari pelaku ekonomi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. “Isu ini dianggap sebagai isu masyarakat kelas atas berpenghasilan dan berpendidikan tinggi,” katanya

Menurut Puspa, pada level nasional, dibandingkan isu-isu ekonomi dan pelayanan sosial, isu-isu lingkungan hidup tak dianggap penting. Ketika mereka bertanya kepada responden apa masalah paling utama mereka, jawabannya, harga

sembako 23,67%, kemiskinan 19,29%, lapangan pekerjaan 14,74%, pelayanan dan biaya kesehatan 10,26%, korupsi 7,55%. Lalu, ketimpangan pendapatan 7,04%, daya beli rendah 5,36%, pendidikan 4,29%. Yang menjawab soal kerusakan lingkungan hanya 1,63%, yang tak tahu atau tak menjawab 1,02%.

Kala ditanya program pemerintah nasional paling penting, jawaban responden menunjukan program bantuan sosial 35,51%, infrastruktur 18,32%, Bantuan langsung tunai (BLT) 11,22%, subsidi listrik dan BBM 10,51%, dana desa 9,95%, program pemudahan akses 5,41%. Lalu, program padat karya 3,62%, pembagian sertifikat tanah 1,99%.

Hanya 1,94%, menjawab program pelestarian lingkungan dan jawab tak tahu 1,53%. Bagi responden yang mengatakan, isu lingkungan utama di Jakarta, malah 0%, Jawa Barat-Banten 21,88%, Jawa Tengah-Yogyakarta 15,63%, Jawa Timur 21,88%, Sumatera 12,50%, Kalimantan 12,50%, Sulawesi 3,13%, NTB, NTT, Bali 3,13%, Maluku-Papua 9,38%.

Untuk pekerjaan responden yang mengatakan masalah lingkungan sebagai isu utama: wirausaha 15,63%, ibu rumah tangga 25%, petani dan nelayan 12,5%, pegawai swasta 18,75%, sedang tak bekerja 6,25%, dan pekerjaan lain 21,88%.

Yose Rizal Damuri, juga peneliti CSIS mengatakan, temuan menarik juga terlihat dari responden yang mengatakan, komitmen lingkungan hidup sebagai alasan memilih capres-cawapres. Dari seluruh responden, hanya 1% memilih komitmen mencegah kerusakan lingkungan hidup sebagai faktor paling penting dalam memilih capres. Dari jumlah itu, proporsi yang memilih presiden petahana 63,16%, yang akan memilih capres oposisi 15,79%. Di antara responden

yang memilih komitmen mencegah kerusakan lingkungan sebagai faktor paling penting dalam memilih capres, proporsi akan memilih PDIP 38.84%.

Saat ditanyakan, bagaimana penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam program pelestarian alam dan lingkungan hidup? Responden yang menyatakan berhasil 57,19%, kurang berhasil 33,98%, tak berhasil sama sekali 4,03%, tidak tahu 4,80%. Dari angka itu, 71,06% menyatakan akan memilih presiden petahana, 23,73% pilih capres oposisi. Sisanya, tak tahu atau belum menentukan pilihan.

“Di tingkat nasional, isu-isu lingkungan hidup tak dianggap penting jika dibandingkan isu ekonomi. Ada *gap* antara diskursus isu lingkungan di hidup di tingkat teknokratis dan di level masyarakat. Ada korelasi positif, tetapi lemah, antara persepsi terhadap pentingnya isu lingkungan dan kinerja pemerintah di bidang lingkungan hidup dan preferensi politik, tetapi belum tentu kausalitas,” katanya.

“Tapi temuan bahwa isu lingkungan, bukan isu yang diminati *voters* jadi problematis dari segi metode survei persepsi.” Selain itu, ukuran sampling juga masih kurang, misal, untuk keseluruhan Sumatera hanya 389 responden. Distribusi responden potensial tak merata dan acak, atau distribusi representasi setiap isu tak mencukupi. Sampel terdampak isu lingkungan di Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, hanya 12% dan asap akibat kebakaran hutan hanya 4,6% di Sumatera.¹²

¹² <https://www.mongabay.co.id/2019/04/16/bagaimana-isu-lingkungan-dalam-pemilu-2019-begini- hasil-riset-csis/>

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Green Political Theory* (Teori Politik Hijau)

Masalah lingkungan mulai mengambil tempat penting dalam politik global pada akhir abad 20. Dengan munculnya environmentalisme, sebagai gerakan sosial dan intelektual, politik hijau juga mulai menjadi bagian dari Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dan telah secara mendalam menduduki literatur dengan meningkatnya masalah lingkungan. Untuk mencegah kebingungan, lingkungan dan Teori Hijau memiliki beberapa perbedaan mendasar seperti yang dijelaskan dalam bab ini.

Ada sejumlah istilah yang digunakan untuk menggambarkan teori politik hijau mulai dari 'ekologisme', hingga 'environmentalisme' atau teori politik ekologis atau teori politik lingkungan (Barry dan Dobson, 2003). Bab ini menggunakan istilah 'teori politik hijau' dengan alasan bahwa label ekologi dan lingkungan, sambil tentu saja menyampaikan salah satu fitur pembeda utama dari teori politik hijau – yaitu fokusnya pada dimensi material/metabolik dari hubungan manusia-nonmanusia sebagai serta status etis dan politik dunia non-manusia – dapat menawarkan pemahaman yang agak sempit tentang politik hijau. Apa yang penulis maksud dengan ini adalah bahwa ekologi, atau teori politik lingkungan, sebagai cara untuk mengkategorikan politik hijau terlalu fokus pada isu-isu alam dan hubungan manusia-alam, setidaknya dalam pandangan penulis, memungkinkan ruang lingkup yang cukup untuk 'prinsip-prinsip politik hijau yang non-ekologis' dan 'tidak berhubungan dengan alam' Hal ini terutama terjadi dalam hal pemahaman dan apresiasi dimensi intra-manusia khususnya dari teori

politik hijau.

J. Barry menjelaskannya bahwa “Teori Politik Hijau dapat dilihat sebagai upaya untuk membawa kemanusiaan dan studi tentang masyarakat manusia turun ke bumi”.¹³ Akibatnya, asumsi utama Teori Hijau yaitu menantang pemahaman tradisional tentang negara, keamanan, pembangunan, dan sebagainya.¹⁴ Pemikiran politik hijau umumnya dilihat sebagai ideologi baru yang muncul pada akhir abad kedua puluh sementara gerakan ekologi pertama dapat ditelusuri kembali ke abad ke sembilan belas pemberontakan melawan industrialisasi. Ideologi hijau modern terbentuk dari campuran kompleks organisasi, komunitas, dan budaya. Meningkatnya dampak industrialisasi, globalisasi dan perkembangan teknologi telah bermanfaat bagi kehidupan kita tetapi juga telah menciptakan banyak masalah. Masalah lingkungan semakin berpengaruh dalam agenda politik karena semakin banyak orang yang menyadari bahwa lingkungan harus dilindungi demi keberlangsungan umat manusia.¹⁵ Ideologi hijau mengkritik perkembangan ekonomi dan teknologi yang merusak alam. Oleh karena itu, ahli teori hijau, atau ahli ekologi, terutama berpendapat bahwa perkembangan teknologi merupakan ancaman bagi keberadaan manusia dan spesies lain juga.

2.2.2. Political Behavior (Perilaku Politik)

Menurut Sobolim, perilaku politik atau *Political Behaviour* adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak

¹³ (Barry, 2014: 2)

¹⁴ (Eckersley, 2013: 267).

¹⁵ (Tarhan, 2018: 155-156)

dan kewajibannya sebagai insan politik.¹⁶ Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Adapun yang dimaksud dengan perilaku politik adalah hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku.¹⁷

Menurut Syarifuddin,¹⁸ salah satu unsur dari perilaku adalah gerak sosial yang terikat oleh empat syarat, yakni:

1. Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu,
2. Terjadi pada situasi tertentu,
3. Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu, dan
4. Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu.

Perilaku memilih berkaitan dengan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan proses pemilu. Menurut Jack Plano, perilaku memilih adalah salah satu bentuk perilaku politik yang terbuka.¹⁹ Sementara itu, Huntington dan Nelson menyebutkan perilaku memilih sebagai *electoral activity*, termasuk pemberian suara (*votes*), bantuan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, menarik masuk atas nama calon, atau tindakan lain yang direncanakan untuk mempengaruhi proses pemilihan umum.²⁰

Salah satu perilaku politik yang dilakukan masyarakat adalah dalam bentuk pemilihan umum. Dalam pemilihan umum masyarakat berpartisipasi

¹⁶ (Sobolim, 2013)

¹⁷ (Sobolim, 2013).

¹⁸ (Syafurudin, 2011)

¹⁹ (Jack Plano, 1985:161)

²⁰ (Samuel, dkk, 1990: 121)

untuk memilih para wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka.²¹ Perilaku pemilih (*voters' behavior*) merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Sedangkan menurut Haryanto, Voting adalah: “Kegiatan warga Negara yang mempunyai hak untuk memilih dan di daftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya”.²² Perilaku memilih (*voting behavior*) menurut Jack C Plano adalah dimaksudkan sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu.²³

Susanto mengartikan *voting behavior* adalah serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pilkada, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menegaskan identitas kelompok dan menunjukkan loyalitas terhadap partai.²⁴ Untuk melihat perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui buku-nya yang berjudul *Political Science and Political Behavior*, yang menyatakan terdapat tiga faktor untuk menganalisis perilaku pemilih pemula, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional.²⁵ Ketiga pendekatan ini akan diuraikan sebagai berikut:

²¹ AG Yudi, *Politic Behaviour Jurnal*, 2015

²² Haryanto(2000),

²³ (Plano,1985)

²⁴ Susanto (1992)

²⁵ Denis Kavanagh, *Political Science and Political Behaviour* (London: Allen and Unwin, 1983) dalam jurnal “ Perilaku pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak 2015 di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015, Oleh: H. Basuki Rachmat dan Esther

a. Pendekatan Sosiologis

Setelah dilakukan perhitungan secara matematis dengan analisis cluster yang dilakukan, sebagian pemilih dapat menentukan pilihannya dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dimana pilihan tersebut dipengaruhi latar belakang lingkungan tempat tinggal, yakni lingkungan keluarganya. Perilaku ikut-ikutan demikian disebabkan karena mereka tidak mampu melihat bagaimana karakteristik pemimpin yang tepat menurut mereka.

b. Pendekatan Psikologis

Menurut pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik, seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, serta dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis.

Namun, figur kandidat yang dianggap memiliki kharismatik dan sosok idaman bagi masyarakat dalam penelitian ini lebih mempengaruhi psikologis pemilih. Mengingat kecenderungan pemilih menjatuhkan pilihannya karena adanya konteks ketokohan yang berperan dominan.

Dalam pendekatan psikologis, Adanya pemilih yang mengidolakan seorang kandidat adalah hasil evaluasi terhadap kandidat. Evaluasi terhadap

kandidat sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seseorang kandidat, khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, di antaranya kualitas, kompetensi dan integritas kandidat.

c. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) atau lazim disebut sebagai pendekatan ekonomi berkembang pada tahun 1960-an dan berkembang setelah memperoleh konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan.

Secara independen ada dua kandidat yang dipertimbangkan karena alasan rasional mengapa kandidat tersebut harus dipilih dan kemudian membandingkan hal tersebut dengan kandidat lainnya. Hingga kemudian mereka mengumpulkan informasi-informasi yang dapat mereka terima terkait kandidat tersebut.

Pemilih pemula dalam memilih tidak memperoleh keuntungan apapun dalam memberikan kemenangan pada calon telah terpilih. Meskipun tidak banyak/beberapa diantara mereka mencoba memberikan alasan yang rasional dengan mengungkapkan keberhasilan dan visi-misi yang ditawarkan oleh kandidat tertentu. Jadi ada semacam proses sosialisasi politik lingkungan. Pemilih dalam memilih juga tidak memandang uang atau barang sebagai acuan dalam memilih.

2.2.3. Teori Persepsi

Persepsi adalah inti dari setiap persoalan dengan cara sudut pandang atau penafsiran setiap orang yang berbeda-beda. Menurut Deddy Mulyana, persepsi merupakan inti dari komunikasi sedangkan rangkaian penafsiran (interpretasi) adalah inti dari persepsi yang identik dengan penyajian balik (*decoding*) dalam proses komunikasi.²⁶ Persepsi sebagai inti dari komunikasi karena tanpa adanya data yang akurat dan komunikasi yang relevan, tidak akan menghasilkan hasil yang efektif. Hal ini dikarenakan persepsi merupakan faktor yang paling penting dalam tahap seleksi informasi, yaitu memilih dan memilah pesan dan ungkapan yang akan disampaikan. Pesan atau ungkapan inilah yang disebut sebagai persepsi.

Persepsi secara etimologi berasal dari bahasa latin '*perception*' dari *percipere* yang artinya menerima atau mengambil. Leavitt mengungkapkan dalam arti sempit bahwasanya persepsi didefinisikan sebagai penglihatan atau cara seseorang melihat sesuatu.²⁷ Namun dalam arti luas Leavitt mendefinisikan persepsi sebagai pandangan atau pengertian, yakni bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut Pareek yang dikutip oleh Alex Sobur, Persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indera atau data.²⁸

²⁶ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*, Remaja Rosda Karya, Bandung : 2002, hal 151

²⁷ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 445

²⁸ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 446

Persepsi dapat dikatakan sebagai proses dalam menilai sesuatu yang bersifat evaluatif dan cenderung subjektif. Maksud dari sifat evaluatif adalah dengan adanya persepsi, seseorang bisa menilai baik dan buruk atau positif dan negatif dari suatu hal yang diterimanya. Sedangkan maksud dari sifat subjektif adalah setiap individu memiliki perbedaan dalam menangkap suatu hal yang diterimanya. Selain itu setiap individu memiliki konseptual yang berbeda dalam mengungkapkan persepsinya, sehingga akan menimbulkan perbedaan tafsiran antara individu satu dan individu lainnya.

Berdasarkan rincian di atas, maka penulis akan melihat lebih lanjut bagaimana persepsi pemilih pemula terhadap caleg pohon di Banda Aceh dengan melakukan wawancara dengan beberapa pemilih pemula untuk dapat melihat bagaimana pandangan atau persepsi mereka terhadap caleg pohon dalam pemilu legislatif DPRK 2019.

2.2.4. Pemilih Pemula

Pemilih pemula di Indonesia kebanyakan masih pelajar di tingkat SLTA dan Mahasiswa semester awal. Pemilih pemula dipandang penting karena mereka dianggap paling rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif, sehingga mereka memerlukan pendekatan yang lebih istimewa dibandingkan dengan pemilih-pemilih dari kelompok yang lain.²⁹ Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru dalam dunia politik. Mereka dianggap cukup netral dalam menentukan sikap politiknya karena belum memiliki afliasi kuat pada tokoh politik atau partai

²⁹ Panggabean. *Pendidikan Politik dan Kaderisasi Bangsa*, Jakarta : Sinar Harapan , 1994.

politik tertentu. Hal itulah yang menyebabkan para politisi berbondong-bondong mengincar suara dari para pemilih pemula dengan melakukan pendekatan dalam berbagai cara. Oleh karenanya, kampanye politik pada pemilih pemula menjadi sangat menarik untuk ditelusuri.

Pentingnya pemilih pemula dikarenakan 20% dari total seluruh pemilih yang ada di Indonesia adalah pemilih pemula. Dengan demikian, jumlah pemilih pemula bisa dikatakan cukup menentukan sehingga memerlukan upaya yang cukup hati-hati untuk memastikan bahwa hak pilih mereka dapat diakomodasi dengan sebaik-baiknya. Misalnya, hak pilih tersebut tidak dapat digunakan dikarenakan mereka tidak terdaftar atau karena kesalahan-kesalahan teknis yang lain.³⁰

Di dalam pemilu, UU No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/ pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.³¹

Rata-rata dari pemilih pemula adalah siswa SMA dan mahasiswa tingkat awal yang sudah memiliki KTP dan telah berusia 17 tahun. Pemilih pemula khususnya remaja yang berusia 17 tahun mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan.

³⁰ Sekretariat Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas, “*Modul: Pemilu untuk Pemula*”, (Jakarta: Penerbit Komisi Pemilihan Umum, 2010) hal 5

³¹ <https://kpud-madinakab.go.id/orientasi-politik-pemilih-pemula/>

Oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Di samping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan.³²

Suara pemilih pemula tidak dipungkiri lagi tentunya menjadi incaran setiap partai politik yang terlibat di dalam pemilu. Proporsi suara pemilih pemula di Banda Aceh khususnya bagi partai politik cukup diperhitungkan, karena suara dari pemilih yang baru menggunakan hak suara ini dinilai masih sangat mudah untuk dipengaruhi, entah itu dari partai lokal maupun partai nasional. Kedua pihak, baik parlok maupun parnas sama-sama berupaya menarik simpati pemilih pemula yang akan menggunakan hak pilihnya. Hal itu pulalah yang menyebabkan suara pemilih pemula menjadi target utama di dalam pemilu legislatif caleg DPRK 2019 di kota Banda Aceh.

Potensi suara pemilih pemula diketahui sangat diperhitungkan oleh partai politik dan caleg yang terlibat dalam pemilu legislatif DPRK 2019 di Banda Aceh. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh, 157.421 orang, sudah termasuk pemilih pemula. Ketua KIP Banda Aceh, Indra Milwady, menyampaikan hal ini di sela-sela lomba kreasi pentas seni yang dilaksanakan KIP Banda Aceh, di Taman Putroe Phang, Banda Aceh, Minggu (31/3/2019).³³ Pemilih Pemula di Banda Aceh dan jumlahnya kian bertambah dari periode tahun sebelumnya di 2014 yang hanya mencapai 11% dari 186 juta jiwa. Angka ini

³² Suhartono, *"Tingkat kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada; suatu Refleksi School Based democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat)"*, (Hasil Penelitian, Pascasarjana UPI, 2009) hal. 6

³³ <https://aceh.tribunnews.com/2019/03/31/dpt-banda-aceh-157421-orang-termasuk-pemilih-pemula>

mengalami peningkatan dibandingkan dua pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2009 ada sekitar 36 juta pemilih pemula dari total 171 juta pemilih (20 persen). Sedangkan pemilu 2004, pemilih pemula hanya berkisar 18,4 persen yaitu 27 juta dari total 147 juta pemilih.³⁴

Keaktifan dari pemilih pemula juga sangat mendukung kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif DPRK Banda Aceh tahun 2019. Tingkat partisipasi pemilih pemula yang cukup besar ini kemungkinan besar didorong oleh kesadaran dan motivasi yang didapatkan pemilih pemula dari berbagai informasi yang dapat dengan mudah diakses melalui media sosial. Kesadaran tersebutlah yang kian mendorong para pemilih pemula untuk bersedia berkecimpung dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif DPRK Kota Banda Aceh tahun 2019 yang lalu.

2.2.5. Caleg Pohon

Pada mulanya, caleg pohon merupakan sebuah proses untuk komunikasi massa yang bertujuan agar bisa memperkenalkan barang atau jasa ke publik dengan cara menempelkan baliho atau spanduk di pohon. Media promosi produk ini bertujuan menawarkan produk atau jasa agar terjual laris di pasar demokrasi. Oleh karena itu poster caleg harus dibuat dengan semenarik mungkin agar dapat memikat hati pemilih untuk bersedia memilihnya. Dalam pemilu legislatif tahun 2019 yang lalu dapat dilihat bagaimana para calon anggota legislatif melakukan berbagai macam cara untuk mensosialisasikan diri dan memasarkan diri mereka

³⁴ <https://kip.bandaacehkota.go.id/sasar-pemilih-pemulakip-banda-aceh-kunjungi-smu/>

agar mendapat jumlah suara yang signifikan. Salah satu caranya adalah dengan menempelkan poster dan atribut peraga kampanye lainnya.

Alat Peraga Kampanye (APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program paslon, simbol, atau tanda gambar paslon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang untuk memilih paslon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD dan dibiayai sendiri oleh paslon.³⁵

Pada konteks komunikasi politik, untuk kampanye caleg DPRK dapil 3 Banda Aceh, media komunikasi yang dianggap cukup efektif adalah berupa media luar ruang. Media luar ruang berupa reklame (baliho) dinilai lebih efektif untuk menarik minat pemilih, mengingat biayanya yang relatif terjangkau. Adapun kelebihan lain dari media luar ruang adalah karena ia terpampang di posisi yang tinggi sehingga lebih mudah dilihat oleh orang banyak. Selain itu, ukuran visual yang besar memudahkannya terlihat dari jarak yang jauh sekali pun. Media luar ruang juga dinilai efektif karena setiap orang yang melintasinya berpeluang besar melihat media tersebut. Namun ia juga tak luput dari kelemahan, yakni durasi orang-orang yang melintas biasanya hanya akan memungkinkan mereka untuk melihat caleg pohon tersebut dalam waktu yang singkat atau sekilas mata memandang yaitu sekitar 5 sampai dengan 10 detik saja. Pesan yang dituliskan pun biasanya sangat singkat sehingga orang-orang tidak dapat mengetahui visi dan misi caleg yang diiklankan. Selain itu, keefektifan media ini juga tergantung di mana ia diletakkan. Sebagai contoh, di desa orang mungkin lama menatapnya

³⁵ <https://karawangkab.bawaslu.go.id/2020/10/26/kamus-pemilu-alat-peraga-kampanye-apk/>

karna didesa tidak banyak orang atau kereta-kereta yang melintasi, jadi masyarakat bisa memandangnya lebih lama. Namun berbeda dengan jalan raya karena orang akan melihatnya sekilas saja disebabkan banyaknya kendaraan yang melintasi jalur tersebut. Maka oleh karena itu lingkungan jalan juga akan mempengaruhi sejauh mana iklan caleg pohon DPRK dapil 3 di Banda Aceh berjalan dengan efektif atau tidaknya.

Sejarah iklan politik diawali di Amerika Serikat sejalan dengan keberhasilan para kapitalisme dalam abad ke 20 dalam hal tehnik-tehnik pencarian dana dengan menjadikan politik sebagai sumber keuangan. Penggunaan media untuk menjual para politisi bukan fenomena baru. Jauh sebelum era media elotronik, media-media seperti pamflets, poster, surat kabar dan petunjuk-petunjuk publik misalnya parade dan pawai digunakan sebagai iklan politik.

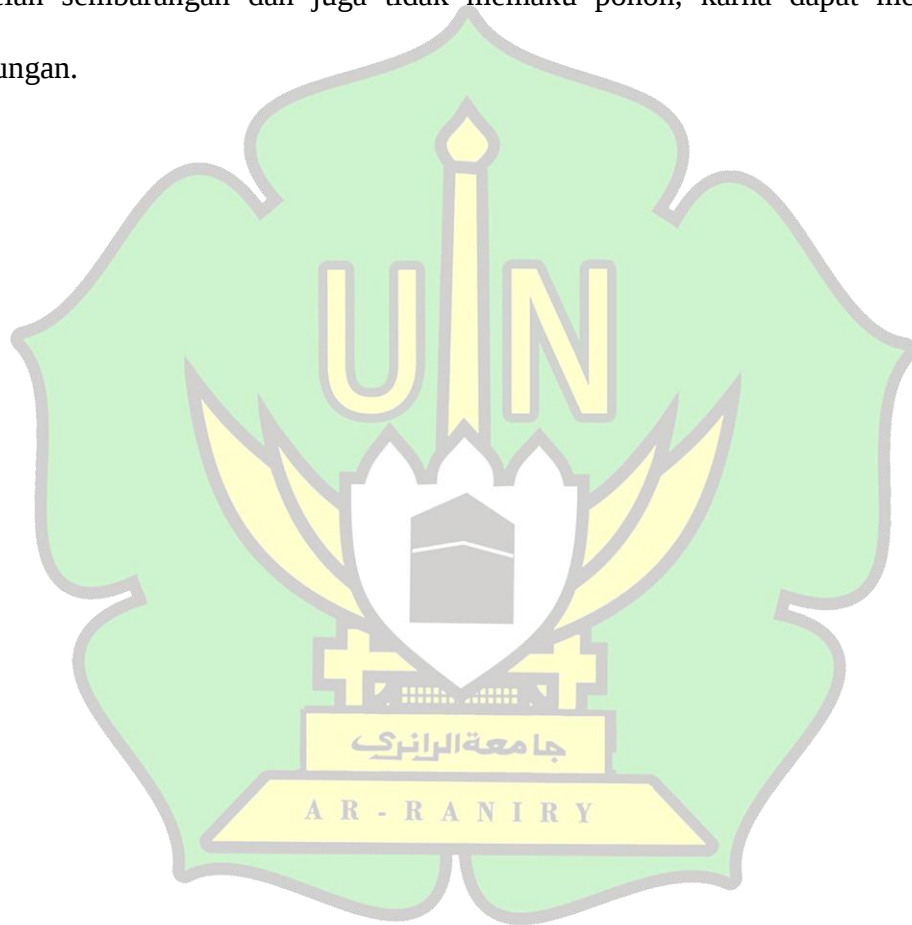
Bolland mendefinisikan iklan sebagai bentuk pembayaran yang dilakukan untuk membeli tempat atau ruang dalam menyampaikan pesan-pesan lembaga atau institusi dalam media.³⁶ Adapun media yang biasa digunakan untuk beriklan adalah bioskop, billboard (baliho), surat kabar, radio dan televisi. Melalui iklan para calon atau kandidat bisa memunikasikan pesan-pesan, ide, program kepada para calon pemilih. Nimmo mengatakan calon mestinya menawarkan diri dalam cara yang berbeda, tetapi dalam produk yang sama.³⁷

Jika mengamati iklan-iklan politik yang muncul, baik dalam kampanye pemilu legislatif maupun dalam kampaye pemilu presiden dan wakil presiden 2004, menurut Indra J. Piliang, iklan-iklan tersebut belum mendidik rakyat. Ini

³⁶ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 345

³⁷ Ibid hlm. 345

terlihat dari beberapa hal.³⁸ Pertama, banyak substansi iklan yang tidak logis sehingga mengesankan ekstasi politik dan demokrasi semata.³⁹ Usaha yang perlu diperhatikan kemudian, menurutnya lagi adalah agar iklan politik dapat mendidik rakyat untuk menjadi contoh terhadap masyarakat yang juga menempelkan iklan poster di sepanjang jalan agar lebih efektif dan efisien untuk tidak melakukan tempelan sembarangan dan juga tidak memaku pohon, karna dapat merusak lingkungan.



³⁸ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 364

³⁹ Ibid hal 364

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran bertahap (*sequential mixed methods*) yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif secara bertahap. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham positivisme, sementara itu penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik (fenomenologis).

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif oleh sebagian kalangan tidak boleh dicampuradukan, namun pemahaman ini dianggap keliru oleh para peneliti yang melihat bahwa masing-masing pendekatan penelitian mempunyai kelemahan, dan oleh karenanya dianggap perlu untuk melakukan kombinasi, agar masing-masing pendekatan saling melengkapi.⁴⁰ Adapun strategi yang penulis gunakan dalam penelitian menggunakan metode campuran bertahap ini adalah dengan menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Metode kualitatif akan membantu peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, sedangkan rumusan masalah ke dua akan dijawab melalui penggunaan metode kuantitatif.

3.1.1. Kualitatif

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada penggunaan diri si peneliti sebagai instrumen. Lincoln dan Guba mengemukakan bahwa dalam pendekatan

⁴⁰ Mohammad Mulydi, *Jurnal Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*, terbit 6 April 2011.

kualitatif peneliti seyogyanya memanfaatkan diri sebagai instrumen, karena instrumen non-manusia sulit digunakan secara luwes untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi yang terjadi. Peneliti harus mampu mengungkap gejala sosial di lapangan dengan mengerahkan segenap fungsi inderawinya.⁴¹ Dengan demikian, peneliti harus dapat diterima oleh informan dan lingkungannya agar mampu mengungkap data yang tersembunyi melalui bahasa tutur, bahasa tubuh, perilaku maupun ungkapan-ungkapan yang berkembang dalam dunia dan lingkungan informan.

3.1.2. Kuantitatif

Setiap penelitian memerlukan rancangan penelitian dan metode tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Di mana penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut.⁴²

Dalam metode kuantitatif, pendekatan analisis korelasi dan regresi linier dilakukan secara sederhana. Karena penelitian ini merupakan penelitian korelasional, maka penelitian ini bermaksud mendeteksi sejauh mana variasi-variasi atau faktor lain berpengaruh berdasarkan koefisien korelasinya⁴³. Sedangkan analisis regresi linier sederhana adalah untuk mengetahui pengaruh variable bebas (x) terhadap variable terikat (y).

⁴¹ Yvonna S. Lincoln & Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills : Sage Publications. 1985, hal. 52

⁴² Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hal 20

⁴³ Julia, *Metode Penelitian*, 2008, hal 21

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Seperti menurut Sugiyono “Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diciptakan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.⁴⁴ Pendapat diatas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah pemilih pemula pada Pemilu 2019 di dapil 3 Kecamatan Syiah Kuala-Ule Kareng.

3.2.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik. yang dimiliki oleh populasi tersebut.”⁴⁵ Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam teknik pengambilan sampel ini, penulis menggunakan teknik *sampling purposive*. Sugiyono menjelaskan bahwa “teknik *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam rangka memudahkan penelitian, penulis menetapkan sifat-sifat dan karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang akan digunakan peneliti memiliki kriteria :

1. Pemilih pemula dapil 3 Kecamatan Syiah Kuala-Ule Kareng.

⁴⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Afabeta, 201)

⁴⁵ Jurnal dalam skripsi Ninoy Yudhistya Sulistiyo, 2013 hal 19

2. Telah terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT)

Menurut Arikunto mengatakan bahwa “apabila subjeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi.⁴⁶ Tetapi, jika jumlah subjek besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15- 25% atau lebih. Di samping itu, menurut Roscoe dalam Sugiyono “ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500⁴⁷.”

Dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan penulis, salah satunya karena dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19, maka penentuan sampel untuk penelitian ini didasarkan pada pendapat Roscoe, yaitu berkisar antara 30 sampai 500 sampel. Berdasarkan hal tersebut, penulis berhasil mendapatkan respon dari 51 orang responden.

No	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	17 Tahun	64	61	125
2	18 Tahun	210	189	399
3	19 Tahun	208	200	408
4	20 Tahun	175	161	336
5	21 Tahun	165	169	334
Jumlah Total				1.602

⁴⁶ Suharsimi, A, (Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. (Jakarta: Rineka Cipta 2006.hal.112

⁴⁷ Jurnal dalam skripsi Ninoy Yudhistya Sulistiyo, 2013 hal 19-20

Tabel 3.1 Rekap Pemilih Pemula Kec Syiah Kuala Tahun 2019 (Sumber : KIP
Kota Banda Aceh 2021)

No	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	17 Tahun	55	57	112
2	18 Tahun	183	208	391
3	19 Tahun	213	231	444
4	20 Tahun	169	148	317
5	21 Tahun	205	189	394
Jumlah Total				1.658

Tabel 3.2 Rekap Pemilih Pemula Kec Ulee Kareng Tahun 2019 (Sumber : KIP
Kota Banda Aceh 2021)

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih Pemula
1	Syiah Kuala	1.602
2	Ulee kareng	1.658
Jumlah Total		3.260

Tabel 3.3 Rekap Total Data Pemilih Pemula Dapil 3

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk mendapatkan hasil yang akurat, perlu dilakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis pada penelitian yang ada. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel terikat (y) dan variabel bebas (x).

Variabel (x)	Caleg pohon
Variabel (y)	Persepsi Pemilih Pemula

Table 3.4 Variabel Penelitian

Variabel (x) merupakan variable bebas, adalah variable yang diduga sebagai penyebab atau pendahulu dari variable yang lain. Variabel (x) dalam penelitian ini yaitu caleg pohon, yang merupakan salah satu usaha yang dilakukan caleg DPRK Banda Aceh untuk menarik simpatisan dari pemilih pemula. Biasanya caleg DPRK menempelkan poster, baliho, dan spanduk di pohon-pohon yang ada di sekitaran jalan Banda Aceh. Sedangkan Variabel (y) merupakan variabel terikat, adalah variabel yang dalam penelitian ini yaitu persepsi pemilih pemula.

3.4. Teknik Pengumpulan Data - R A N I R Y

Pada penelitian dengan *sequential mixed methods*, yaitu penelitian yang menggunakan dua metode, kuantitatif dan kualitatif secara bertahap, maka strategi pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan interview/wawancara untuk mendapatkan data kualitatif, baru kemudian diikuti dengan menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data kuantitatif.

Dalam pengumpulan data yang dilakukan, peneliti akan menggunakan 2 teknik, yaitu⁴⁸:

1. Interview/ wawancara: Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya / pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (interview guide). Disini peneliti menggunakan metode *in-depth interview*.
2. Kuesioner adalah proses meperoleh data dari responden pemilih pemula di dapil 3 yaitu syiah kuala dan ulee-kareng dengan cara membagikan koesioner kepada pemilih pemula caleg DPRK Dapil 3 Banda Aceh.

3.5. Fokus Penelitian

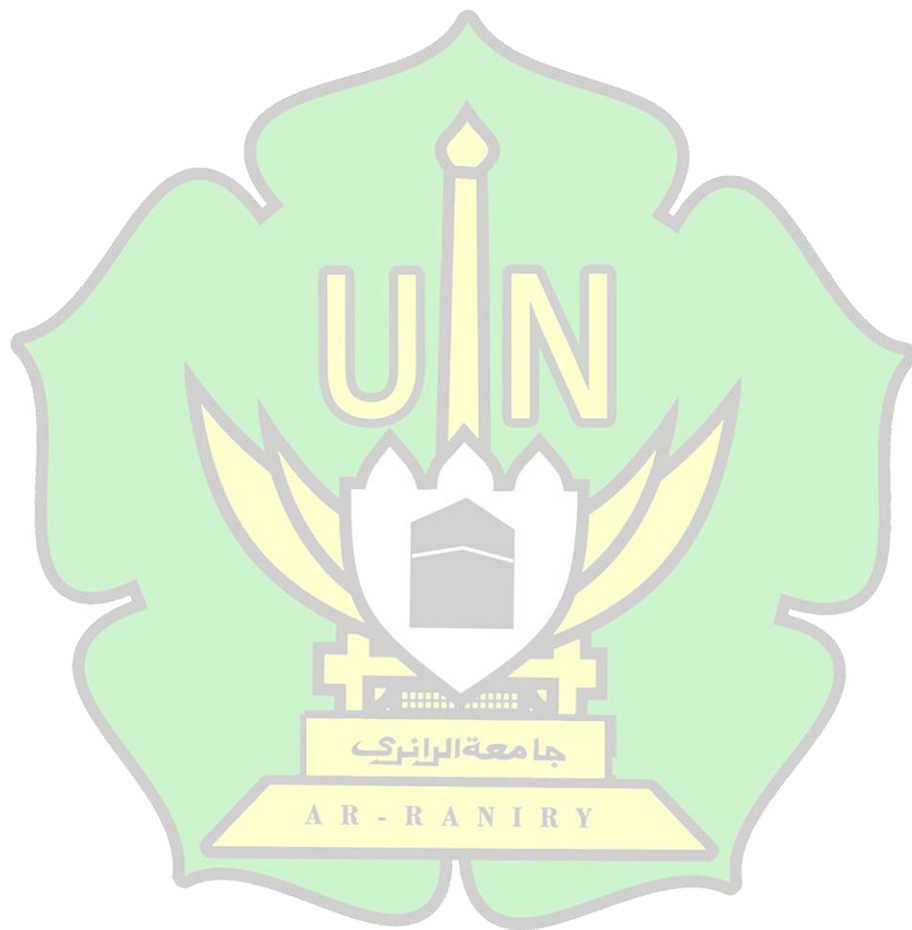
Fokus penelitian yang akan saya teliti tentang, “Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Caleg Pohon Tahun 2019 (Studi Kasus Banda Aceh)”. Pada penelitian ini, pertama sekali, peneliti ingin melihat bagaimana persepsi pemilih pemula Dapil 3 Kota Banda Aceh terhadap fenomena caleg pohon. Kemudian, peneliti ingin memeriksa secara lebih lanjut apakah persepsi tersebut turut mempengaruhi pilihan politik mereka pada Pemilu 2019.

3.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah kota Banda Aceh untuk mengetahui persepsi pemilih pemula caleg pohon DPRK dapil 3 di Banda Aceh. Hal ini

⁴⁸ Sumadi Suryabrata. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali. Hal. 94.

mengingat jumlah pemilih pemula yang cukup signifikan dari Dapil tersebut pada Pemilu 2019.



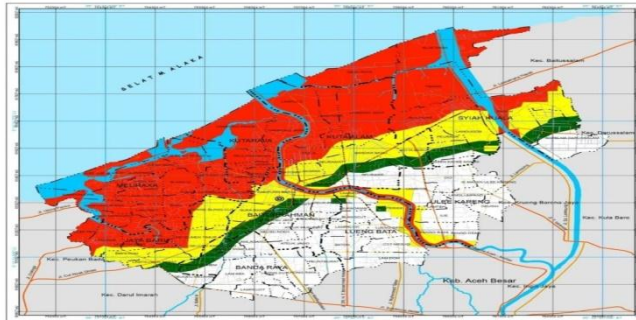
BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Letak Geografis Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh yang dahulu bernama Kutaraja merupakan Ibu Kota dari Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh didirikan pada hari Jumat, 1 Ramadhan 601H (22 April 1205) oleh Sultan Alaidin Johansyah setelah berhasil menaklukkan kerajaan bercorak Hindu/Budha dengan ibukotanya Bandar Lamuri. Sejak 28 Desember 1962 berubah dari Kutaraja menjadi Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43.

Wilayah geografis Kota Banda Aceh yang menjadi Ibukota Provinsi terletak antara 050 16" 15" – 050 36" 16" Lintang Utara dan 950 16" 15" – 950 22" 35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah administratif Kota Banda Aceh sebesar 61.359 ha atau kisaran 61,36 km², luas ini dibagi ke dalam 9 Kecamatan, yaitu: Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraksa, Syiah Kuala, Ulee Kareng.



Gambar 4.1 **Peta Kota Banda Aceh**

Letak geografis Kota Banda Aceh sangat strategis baik ditinjau dari segi teknis maupun ekonomis untuk industri perikanan dan hasil laut, karena berada di pertemuan Selat Malaka dan Samudera Hindia yang kaya dengan sumber daya lautnya, di samping itu juga sebagai pintu gerbang lalu lintas pelayaran internasional yang menghubungkan bagian barat dan timur.

4.2 Panwaslih Kota Banda Aceh

Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, Panwaslu Kota Banda Aceh telah diubah nomenklaturnya menjadi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh. Panwaslih adalah satu kesatuan hierarki dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berwenang mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh. Nama Panwaslih khusus di Aceh sesuai dengan amanah special regulation Pasal 60 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan wewenang yang besar kepada Pengawas Pemilu dengan tugas Pengawasan Tahapan Pemilu, Penindakan Pelanggaran Pemilu bahkan Pengawas Pemilu dapat menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Proses Pemilihan Umum. Semua tahapan Pemilu dan hasil Pemilu harus berintegritas dan diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 2019 adalah tahun yang sangat strategis bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dua agenda besar telah dilaksanakan yaitu Pemilihan Legislatif serentak di seluruh Indonesia serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dituntut untuk dapat mempersiapkan seluruh jajaran Pengawas Pemilu baik dari aspek kelembagaan maupun dari aspek teknis pengawasan Pemilu termasuk SDM-nya agar telaksananya Pengawasan Pemilu untuk menjamin seluruh tahapan telaksana secara Luber, jujur, adil, berkualitas serta berintegritas baik prosedur maupun hasil Pemilu.

4.2.1 Tugas Panwaslih

Dalam melakukan tugasnya terhadap penindakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebut UU Pemilu menyebutkan Bawaslu Kabupaten/kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

1. Pelanggaran Pemilu; dan

2. Sengketa proses Pemilu

Pada Pasal 101 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Pasal 101 Ayat (3) UU Pemilu menyebutkan bahwa dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf

a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.⁴⁹

4.3 Pemilih Pemula Dapil 3 Kota Banda Aceh

Di dalam UU No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/ pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.⁵⁰

Rata-rata dari pemilih pemula adalah siswa SMA dan mahasiswa tingkat awal yang sudah memiliki KTP dan telah berusia 17 tahun. Sejauh ini sudah tercatat 20% dari total seluruh pemilih pemula yang ada di Indonesia. Dengan demikian, jumlah pemilih pemula bisa dikatakan cukup menentukan perkembangan arah demokrasi yang ada di Indonesia, sehingga memerlukan upaya yang cukup hati-hati untuk memastikan bahwa hak pilih mereka dapat diakomodasi dengan sebaik-baiknya.

⁴⁹ M. Y. AlQardhawy, S.Hi MH., *Panswalih Kota Banda Aceh, Divisi Penindakan Pelanggaran* , (Banda Aceh, 2019), hal 8

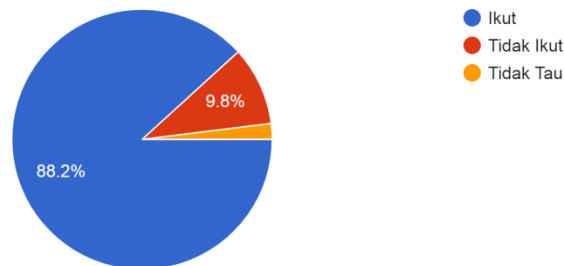
⁵⁰ <https://kpud-madinakab.go.id/orientasi-politik-pemilih-pemula/>

Pemilih pemula DPRK Banda Aceh dapil 3 mencakup Syiah Kuala dan Ulee-Kareng. Presentase pemilih pemula bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ini sebanyak **3.260** pemilih pemula Dapil 3 yang tercatat dalam data KIP Kota Banda Aceh 2019. Dan didominasi rata-rata pemilih pemula yang berumur 19 tahun mencakup laki-laki dan perempuan. Sedang Jumlah keseluruhan Pemilih Pemula di Banda Aceh mencapai **13,579**.

4.4 Persepsi Pemilih Pemula mengenai Caleg Pohon

Berdasarkan hasil penyebaran angket yang peneliti lakukan, sebanyak 88,2 % responden telah mengikuti pemilihan caleg DPRK pada tahun 2019.

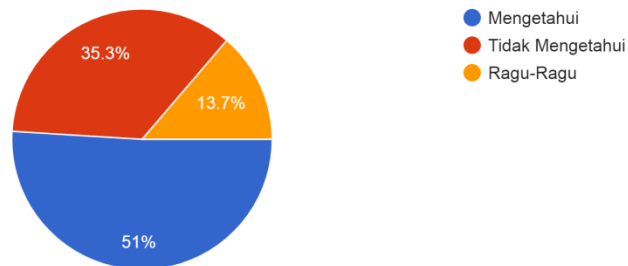
Apakah Anda ikut memilih Caleg DPRK di Banda Aceh (2019)
51 responses



Dari seluruh responden, hanya 51% partisipan yang mengetahui bahwa poster dan selebaran caleg tidak bisa ditempelkan disembarang tempat.

Apakah anda mengetahui bahwa Poster dan spanduk tidak bisa ditempelkan disembarang tempat ?

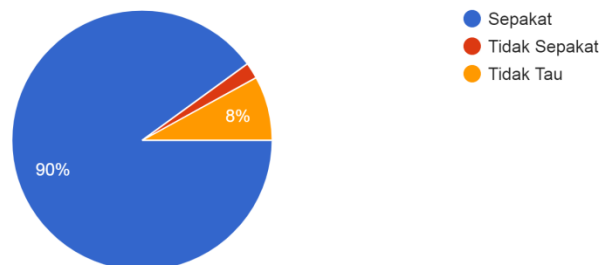
51 responses



Akan tetapi, 90% responden setuju bahwa poster dan spanduk sebaiknya ditempatkan di tempat khusus, bukan di sembarang tempat.

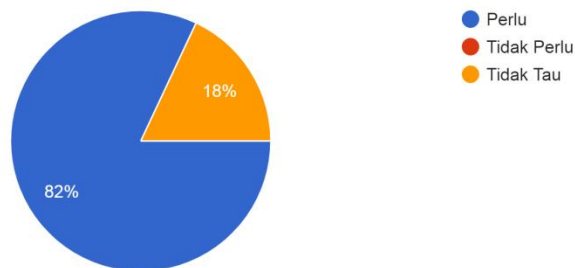
Apakah anda sepakat dengan tempat penempelan spanduk / poster baliho ditempatkan ditempat khusus

50 responses



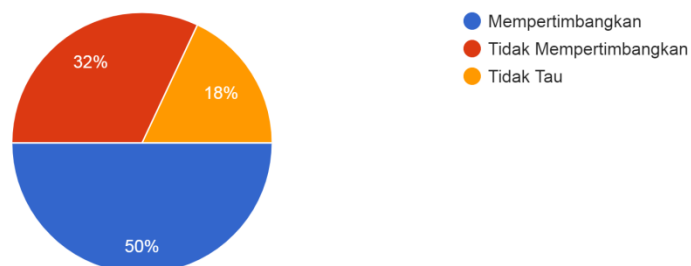
Kemudian 82 % responden setuju bahwa seharusnya ada sanksi yang tepat bagi para pelanggar atribut kampanye, sebagaimana ditunjukkan pada diagram di bawah.

Apakah perlu adanya sanksi hukum kepada pelanggar Atk ?
50 responses



Lebih jauh lagi, ketika ditanya mengenai apakah mereka mempertimbangkan caleg yang melanggar dalam pemasangan atribut kampanye, sebanyak 50% masih menjawab akan mempertimbangkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran atribut kampanye, belum cukup menyebabkan pelanggar tereliminasi dari preferensi para responden.

Apakah anda mempertimbangkan caleg yang melanggar hukum dalam penempelan spanduk / poster baliho ?
50 responses

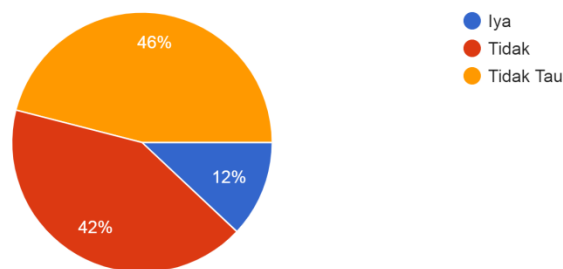


Ketika responden ditanyakan secara spesifik mengenai apakah mereka telah memilih caleg yang melanggar atribut kampanye pada Pemilu 2019, sebanyak 46% responden menjawab tidak mengetahui. Bagi penulis, hal ini mengimplikasikan beberapa hal:

1. Responden tidak mengetahui bahwa caleg yang telah dipilihnya terlibat atau tidak terlibat dalam pelanggaran atribut kampanye
2. Responden tidak mendapatkan informasi mengenai pelanggaran atribut kampanye
3. Responden belum mempertimbangkan pelanggaran atribut kampanye dalam preferensi memilihnya.



Apakah Anda memilih calon DPRK Banda Aceh yang melanggar Atk ?
50 responses



4.5 Perilaku Pemilih Pemula pada Pemilu 2019

Pada penelitian ini peneliti mengambil responden sebanyak 51 responden yang kemudian di kelompokkan menurut daerah, Jenis Kelamin, umur, intansi, organisasi dan jabatan. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka akan disajikan tabel Mengenai data responden. Berdasarkan hasil 51 eksemplar kuesioner yang telah disebar dan dijawab oleh responden maka didapatkan hasil karakteristik responden sebagai berikut.

Pada penelitian ini 51 orang yang dipilih sebagai responden. Adapun persebaran responden berdasarkan alamat daerah ditunjukkan dalam tabel berikut:

No	Alamat	Jawaban Responden
1	Lamgugob	6 responses
2	Lambhuk	5 responses
3	Tibang	5 responses
4	Jeulingke	4 responses
5	Ulee Kareng, lampineng	2 responses
6	Ie masen kaye adang	2 responses
7	Ulee Kareng	2 responses
8	Peurada	2 responses
9	Lamteh	2 responses
10	Ie masen, ulee kareng	1 response
11	Ule Kareng, lampineng	1 response
12	Ie masen Ulee kareng	1 response
13	Ie masen Ulee Kareng	1 response
14	ie masen ulee kareng	1 response
15	Jeulingke rawa sakti	1 response
16	Ie Masen Ulee Kareng	1 response
17	Ie masen ulee kareng	1 response
18	Ie masen Kaye adang	1 response
19	Rukoh Banda Aceh	1 response
20	Gampong pineng	1 response
21	Kp keuramat	1 response

22	Deah Raya	1 response
23	Lampineng	1 response
24	Lamgugop	1 response
25	Lambhuuk	1 response
26	Lamyong	1 response
27	Lingke	1 response
28	Beurwe	1 response
29	Ulele	1 response
30	Prada	1 response
	Total	51 Responden

Adapun persebaran responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

No	Jenis kelamin	Jawaban Responden	
		Frekuensi	Persen
1	Laki-laki	36	70,6
2	Perempuan	15	29,4
	Total	51	100

Sumber : Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki terdapat sebanyak 36 orang atau 70,6 % sedang responden yang berjenis kelamin perempuan terdapat sebanyak 15 orang atau 29,4 %. Dapat

disimpulkan responden pada penelitian ini didominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki.

Adapun persebaran responden berdasarkan umur ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

No	Umur	Jawaban Responden	
		Frekuensi	Persen
1	17-19	2	3,9
2	19-21	19	37,2
3	21-23	25	49,1
4	23-25	5	9,8
Total		51	100

Sumber : Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berusia 17-19 tahun berjumlah sebanyak 2 orang yaitu sebesar 3,9 %, usia 19-21 tahun sebanyak 19 orang yaitu sebesar 37,2 %, usia 21-23 tahun sebanyak 25 orang yaitu sebesar 49,1 %, dan usia 23-25 tahun sebanyak 5 orang yaitu sebesar 9,8 %. Dapat disimpulkan responden pada penelitian ini didominasi oleh responden berusia 21-23 tahun.

Adapun persebaran responden berdasarkan intansi ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

No	Intansi	Jawaban Responden	
		Frekuensi	Persen
1	Uin Ar-Raniry	5	17,1

2	Unsyiah Syah Kuala	7	24
3	Kasus Aceh	1	3,4
4	Mahasiswa	4	13,8
5	Tidak ada	34	41,4
	Total	51	99,7

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berasal dari intansi Uin Ar-Raniry sebanyak 5 orang atau 17,1 % , intansi Unsyiah sebanyak 7 orang atau 24 % , intansi kasus aceh sebanyak 1 orang atau 3,4 % , intansi mahasiswa 4 orang atau 13,8 % dan tidak ada intansi sebanyak 34 orang atau sebanyak 41,4 %. Dapat disimpulkan responden pada penelitian ini adalah intansi tidak ada didominasi oleh responden terbanyak.

Untuk melihat perilaku pemilih pemula terhadap caleg pohon di Banda Aceh ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui buku-nya yang berjudul *Political Science and Political Behavior*, menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional. Merujuk pada hasil studi serta pendekatan-pendekatan di atas, penelitian ini mencoba menggambarkan dan menganalisis tentang kecenderungan perilaku pemilih pemula Dapil 3 Kota Banda Aceh berdasarkan pengalaman mereka pada Pemilu tahun 2019. Ketiga pendekatan ini akan diuraikan sebagai berikut⁵¹:

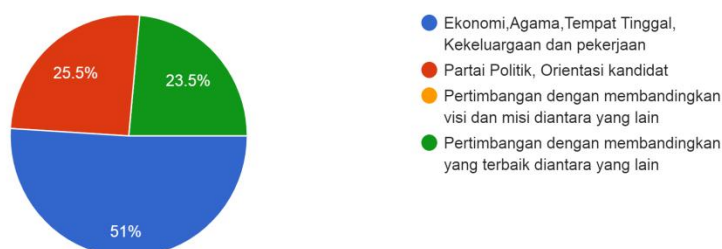
⁵¹ Denis Kavanagh, *Political Science and Political Behaviour* (London: Allen and Unwin, 1983) dalam jurnal “ Perilaku pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak 2015 di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015, Oleh: H. Basuki Rachmat dan Esther

Diagram

Pertimbangan Pemilih Pemula

Pertimbangan apa yang anda lakukan pada saat memilih ?

51 responses



4.5.1. Pendekatan Sosiologis

Setelah dilakukan hitungan secara matematis dengan analisis cluster yang peneliti lakukan, persentase pemilih pemula yang menentukan pilihannya dengan menggunakan pendekatan sosiologis adalah sebesar 51%. Pertimbangan yang mereka lakukan didasarkan pada aspek afiliasi terhadap agama, tempat tinggal, dan pilihan mayoritas anggota keluarga.

Pendekatan sosiologis digunakan karena mereka belum mampu melihat bagaimana karakteristik pemimpin yang tepat menurut mereka. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai apakah seorang caleg melanggar pemasangan ATK (caleg pohon) tidak menjadi salah satu pertimbangan mereka. Jadi mereka tidak mau tau caleg itu melanggar ATK atau tidak dalam kata kutip “Caleg Pohon” mereka tetap memilih berdasarkan pendekatan sosiologis. Selain itu, keputusan

politik mereka masih belum bulat menyebabkan pilihan politik mereka mudah mendapat pengaruh dari lingkungan dan pengelompokan sosial yang terbentuk di tempat tinggal mereka, khusus di dalam keluarga dan orangtua.

Pernyataan di atas jelas bahwa pemilih pemula tidak tersentuh atau mendapatkan pendidikan politik bagaimana memilih pemimpin yang cocok tentunya pemimpin yang tidak melanggar Atribut Kampaye “Caleg Pohon”. Selain itu perilaku ikut-ikutan demikian juga diakibatkan karena kurangnya mental pemilih pemula untuk menentukan pilihan mereka juga belum tahu bagaimana memilih pemimpin yang tepat. Meskipun demikian, perilaku tersebut menunjukkan Adanya preferensi pilihan yang sama dengan preferensi pilihan orangtuanya.

Hal ini sejalan dalam pendekatan sosiologis yang melihat hubungan antara predisposisi sosial- ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang berkaitan dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya, preferensi-preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah, atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak. Predisposisi sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dan lain-lain.

4.5.2. Pendekatan Psikologis

Berdasarkan hasil kuisioner yang peneliti lakukan, dan peneliti mendapatkan jawaban berdasarkan hitungan analisis cluster, dimana

kecenderungan pemilih pemula dalam menjatuhkan pilihannya melalui pertimbangan psikologis adalah sebesar 25,5 %.

Menurut pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, serta dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis.

Namun, figur kandidat yang dianggap memiliki kharismatik dan sosok idaman bagi masyarakat dalam penelitian ini lebih mempengaruhi psikologis pemilih pemula. Mengingat kecenderungan pemilih pemula menjatuhkan pilihannya karena adanya konteks ketokohan yang berperan dominan.

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan adanya perilaku pemilih dengan berdasarkan pada pendekatan psikologis pada pemilih pemula Dapil 3 Banda Aceh. Dimana pemilih pemula menjatuhkan pilihan pada figur kandidat yang mereka idolakan, meskipun presentasinya tidak signifikan jika dibandingkan dengan perilaku yang menggunakan pendekatan sosiologis. Menurut penulis, adanya perilaku psikologis ini disebabkan oleh kedekatan atau ikatan emosional pemilih pemula terhadap figur kandidat yang mereka anggap mampu memimpin daerahnya.

Dalam pendekatan psikologis, adanya pemilih yang mengidolakan seorang kandidat didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kandidat. Evaluasi

terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seseorang kandidat, khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, di antaranya kualitas, kompetensi dan integritas kandidat.

Menurut penulis, dalam prakteknya, pendekatan sosiologis saling berkaitan dengan pendekatan psikologis. Seorang pemilih yang memilih seorang kandidat bisa jadi pula dipengaruhi oleh kesamaan suku dan agama antara pemilih dan kandidat yang mencalonkan diri. Namun hal itu diperantarai oleh persepsi dan sikap, baik terhadap faktor sosiologis tersebut maupun terhadap partai politik atau kandidat. Yang muncul kemudian bukan faktor sosiologis secara objektif, melainkan faktor sosiologis sebagaimana dipersepsikan. Dalam prosesnya, pentingnya faktor sosiologis akan terkait pula dengan faktor psikologis.

4.5.3. Pendekatan Pilihan Rasional

Adapun responden yang mendasarkan pilihan mereka pada pendekatan pilihan rasional adalah sebanyak 23,5 %.

Pendekatan pilihan rasional (rational choice) atau lazim disebut sebagai pendekatan ekonomik berkembang pada tahun 1960-an dan berkembang setelah memperoleh konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan.

Secara independen ada dua informan yang memilih karena alasan rasional mengapa kandidat tersebut harus dipilih dan kemudian membandingkan hal tersebut dengan kandidat lainnya. Hingga kemudian mereka mengumpulkan informasi-informasi yang dapat mereka terima terkait kandidat tersebut.

Berikut petikan hasil wawancara dengan salah seorang warga Kota Banda Aceh Kecamatan Ulee Kareng Riski Marzuki, ketika diwawancarai menyatakan:

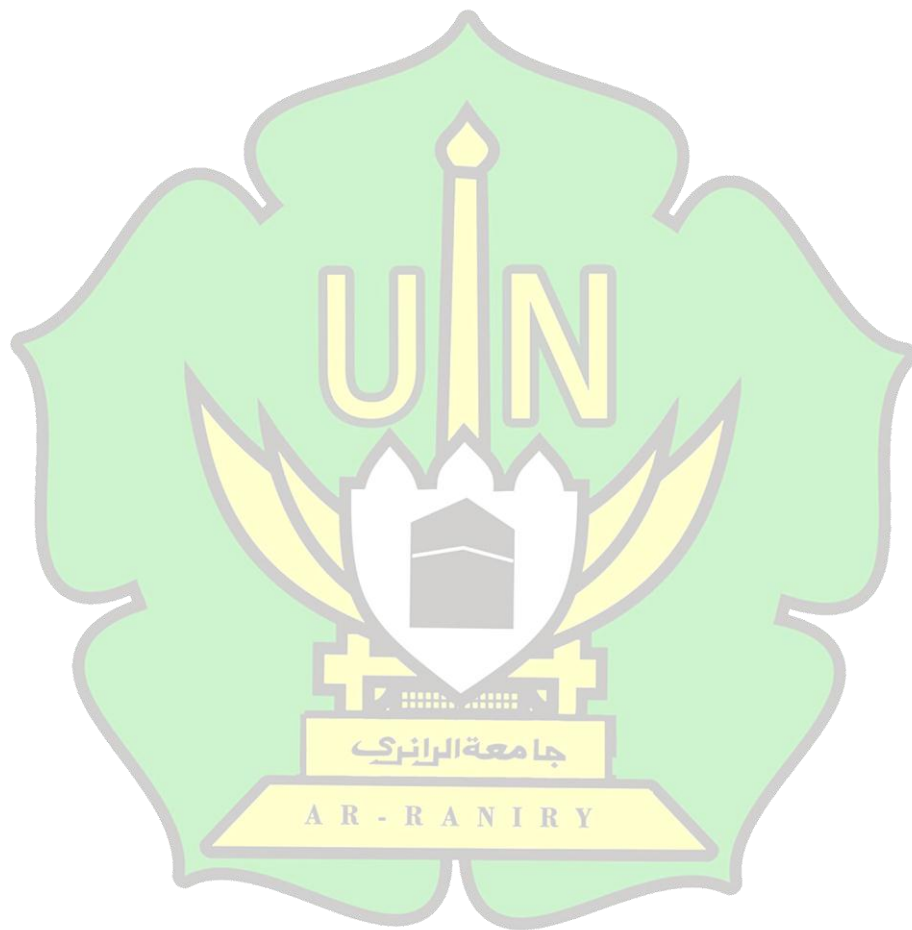
"Saya memilih karena ada beberapa hal, yaitu karena kandidat tersebut memiliki banyak pengalaman, sudah salah satu pengalamannya sudah terbukti memiliki kinerja kepemimpinan tahun yang lalu memimpin dengan cara yang baik, ini dapat dilihat dari keberhasilannya membangun daerah dan kejujurannya didalam masa kepengurusannya."

Pernyataan di atas tidak berbeda dengan yang diutarakan oleh salah seorang warga kecamatan Syiah Kuala Irwan, ketika diwawancarai menyatakan:

"visi-misi yang ditawarkan sangat bagus dan masuk akal. Khususnya dalam membangun Kota Banda Aceh yang gemilang, dan daerah kita adalah daerah kota Madya tentu saja membutuhkan pemimpin yang arif dan bijaksana akan programnya."

Berdasarkan survey di atas, dapat dilihat bahwa sangat sedikit pemilih pemula yang menggunakan pendekatan pilihan rasional dalam menentukan pilihan politiknya jika dibandingkan dengan yang menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis. Meskipun tidak banyak atau beberapa, diantara mereka mencoba memberikan alasan yang rasional dengan mengungkapkan keberhasilan dan visi-misi yang ditawarkan oleh kandidat tertentu. Pemilih

dalam memilih juga tidak memandang uang atau barang sebagai acuan dalam memilih tapi mereka lebih melihat kepada tindakan sosialnya yang rasional.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Caleg pohon merupakan sebuah proses untuk komunikasi massa yang bertujuan agar bisa memperkenalkan barang atau jasa ke publik dengan cara menempelkan baliho atau spanduk di. Pemilih pemula adalah orang yang telah memenuhi syarat atau terdaftar untuk menjadi pemilih yaitu memiliki KTP. Dalam pemilu legislatif tahun 2019 yang lalu dapat dilihat bagaimana para calon anggota legislatif melakukan berbagai macam cara untuk mensosialisasikan diri dan memasarkan diri mereka agar mendapat jumlah suara yang signifikan. Salah satu caranya adalah dengan menempelkan poster dan atribut-atribut lainnya.

Adapun hasil penelitian yang telah penulis dapatkan bahwa sebagian besar masyarakat dan stackholder yang terlibat dalam pemilihan legislatif 2019 tidak sepakat dengan caleg yang melanggar apalagi memaku di pohon. Sedangkan sebagian besar pemilih pemula yang menjadi responden dalam penelitian ini juga tidak sepakat terhadap caleg yang melanggar atribut kampanye dan mereka sepakat terhadap diberinya sanksi terhadap pelaku caleg pohon. pada Pemilu 2019. Kesimpulan akhir yang penulis dapatkan bahwa meskipun mereka tidak menyetujui pelanggaran atribut kampanye yang dilakukan caleg dan menginginkan pemberlakuan sanksi hukum, namun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan mereka saat menentukan pilihannya pada pemilihan umum 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Kennedy, John E dan Soemanagara, R Dermawan, *Marketing Communication*
, (Jakarta: Buana Ilmu Popular, 2006)

Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Pustaka Setia Bandung: 2003

Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Remaja Rosda Karya, Bandung:
2005)

Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*, (Remaja Rosda Karya,
Bandung : 2002)

Panggabean. *Pendidikan Politik dan Kaderisasi Bangsa*, (Jakarta : Sinar Harapan ,
1994.)

Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012),

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung:
Alfabeta, 2011)

Sumadi Suryabrata. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali.

M. Y. AlQardhawy, S.Hi MH., *Panswalih Kota Banda Aceh, Divisi Penindakan
Pelanggaran* , (Banda Aceh, 2019),

Jurnal

Deborah Lynn Guber, 2001. *Jurnal Masyarakat dan Sumber Daya Alam*, 14:455–469, Hak Cipta Taylor & Francis

AG Yudi · , *Politic Behaviour Jurnal*, 2015

Denis Kavanagh, *Political Science and Political Behaviour* (London: Allen and Unwin, 1983) dalam jurnal “ Perilaku pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak 2015 di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015, Oleh: H. Basuki Rachmat dan Esther

Sekretariat Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas, “*Modul: Pemilu untuk Pemula*”, (Jakarta: Penerbit Komisi Pemilihan Umum, 2010)

Suhartono, “*Tingkat kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada; suatu Refleksi School Based democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat)*”, (Hasil Penelitian, Pascasarjana UPI, 2009)

Mohammad Mulydi, *Jurnal Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*, terbit 6 April 2011.

Yvonna S. Lincoln & Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills : Sage Publications.1985

Julia, *Metode Penelitian*, 2008,

Jurnal dalam skripsi Ninoy Yudhistya Sulistiyo, 2013

Suharsimi, A, (Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. (Jakarta: Rineka Cipta 2006).

Internet

<https://news.detik.com/berita/d-4449707/ribuan-spanduk-caleg-di-banda-aceh-dibongkar-dari-fasilitas-publik>

<https://aceh.tribunnews.com/2019/03/31/dpt-banda-aceh-157421-orang-termasuk-pemilih-pemula>

Kumparan News, 12 Februari 2019, *WALHI Aceh: Jangan Pilih Caleg yang Merusak Pohon*

KumparanNews, 11 Februari 2019, *Panwaslih Banda Aceh Kewalahan Bersihkan APK Caleg yang Berantakan*, Diakses pada 31 Maret 2021

Detik News , 29 April 2019, *Partisipasi Pemilih di Banda Aceh Tertinggi Sepanjang Sejarah*. Diakses pada 31 maret 2021.

<https://www.mongabay.co.id/2019/04/16/bagaimana-isu-lingkungan-dalam-pemilu-2019-begini-hasil-riset-csis/>

<https://kpud-madinakab.go.id/orientasi-politik-pemilih-pemula/>

<https://www.acehtrend.com/2020/01/22/dprk-terima-laporan-hasil-pemilu-2019-dari-kip-banda-aceh/>

<https://kip.bandaacehkota.go.id/sasar-pemilih-pemulakip-banda-aceh-kunjungi-smu/>

<https://karawangkab.bawaslu.go.id/2020/10/26/kamus-pemilu-alat-peraga-kampanye-apk/>

<https://kpud-madinakab.go.id/orientasi-politik-pemilih-pemula/>

Daftar Koesioner

PERSEPSI PEMILIH PEMULA TERHADAP CALEG POHON (STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH)

Assalamualikum WR.WB

Saya yang bernama Muhammad Afdhal, Mahasiswa Prodi Ilmu Politik , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Saya sedang melakukan penelitian untuk keperluan skripsi. untuk itu saya mohon kerjasama dari Saudara /i untuk berpartisipasi dalam mengisi koesiner berikut:

1. Koesioner ini bertujuan untuk mengetahui pendapat pemilih pemula dalam pemilu caleg DPRK di Banda Aceh 2019
2. Koesioner ini ditunjukkan kepada pemilih pemula baik mahasiswa maupun masyarakat dalam pemilu caleg DPRK di Banda Aceh 2019.
3. Tidak ada jawaban benar dan salah dalam koesioner ini, sehingga saudara/i pemilih pemula diharapkan dapat mengisi koesioner ini sesuai dengan yang dirasakan saat memilih.
4. Data dan informasi yang kami berikan akan digunakan untuk penelitian dan dijamin kerasiaan kepada yang menjawab

Atas kesediaan waktu dan partisipasinya dalam menjawab saya Mengucapkan Terima Kasih. Wassalamualikum WR.WB

Hormat Peneliti
Muhammad Afdhal

Nim : 160801036



muhammadafdhal170@gmail.com (not shared)



[Switch account](#)

Next

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

PERSEPSI PEMILIH PEMULA TERHADAP CALEG POHON (STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH)



muhammadafdhal170@gmail.com (not shared)

[Switch account](#)



Identitas

Nama

Your answer

Asal daerah/Kota

Your answer

Alamat

Your answer

Jenis Kelamin



Laki-laki



Perempuan

Umur

Your answer

Intansi (Jika ada)

Your answer

Organisasi (Jika ada)

Your answer

Jabatan (Jika ada)

Your answer

Back

Next

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

PERSEPSI PEMILIH PEMULA TERHADAP CALEG POHON (STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH)

 muhammadafidhal170@gmail.com (not shared)
[Switch account](#)



Pertanyaan

Apakah Anda ikut memilih Caleg DPRK di Banda Aceh (2019)

- ☐ Ikut
- ☐ Tidak ikut
- ☐ Tidak Tau

Pertimbangan apa yang anda lakukan pada saat memilih ?

- ☐ Ekonomi, Agama, Tempat Tinggal, Kekeluargaan dan pekerjaan
- ☐ Partai Politik, Orientasi kandidat
- ☐ Pertimbangan dengan membandingkan visi dan misi diantara yang lain

Dari skala 1 sampai 5 seberapa besar isu lingkungan berpengaruh terhadap referensi memilih ?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

Apakah anda mengetahui bahwa Poster dan spanduk tidak bisa ditempelkan disembarang tempat ?

- ☐ Mengetahui
- ☐ Tidak Mengetahui
- ☐ Ragu-Ragu

Apakah Anda memilih calon DPRK Banda Aceh yang melanggar Atk ?

- ☐ Iya
- ☐ Tidak
- ☐ Tidak Tau

Apakah perlu adanya sanksi hukum kepada pelanggar Atk ?

- ☐ Perlu
- ☐ Tidak Perlu
- ☐ Tidak Tau

Apakah anda sepakat dengan tempat penempelan spanduk / poster baliho ditempatkan ditempat khusus

- ☐ Sepakat
- ☐ Tidak Sepakat
- ☐ Tidak Tau

Apakah anda mempertimbangkan caleg yang melanggar hukum dalam penempelan spanduk / poster baliho ?

- ☐ Mempertimbangkan
- ☐ Tidak Mempertimbangkan
- ☐ Tidak Tau

[Back](#)

[Submit](#)

[Clear form](#)
